

# 2023

# Laporan Kinerja

Biro Hubungan Masyarakat  
dan Teknologi Informasi

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini adalah pemenuhan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas capaian Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Seluruh target dan sasaran kinerja telah tercapai dan turut berkontribusi positif kepada pencapaian kinerja Ombudsman Republik Indonesia. Namun peningkatan dan perbaikan tetap diperlukan sehingga kinerja selalu lebih baik dari tahun sebelumnya, baik secara kualitas, kuantitas, efektifitas, dan akuntabilitas.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan berikan penghargaan kepada seluruh pihak internal maupun eksternal Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi atas bantuan dan kerjasamanya dalam mendukung dan ikut mengawal pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Masukan dan kritikan yang membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja secara terus menerus. Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta,        Februari 2023  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

#

**DODI WAHYUGI ST, MMSI**  
NIP. 19810622 200312 1003

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman Republik Indonesia adalah sebuah unit kerja di dalam lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok selaku pengelola dan penanggung jawab Pelayanan Informasi dan Kehumasan, Teknologi Informasi, serta Sistem Data dan Informasi (Sisdatin) dan Layanan Kepustakaan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Serta menyelenggarakan fungsi koordinasi pengelolaan dan layanan hubungan masyarakat; koordinasi pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi; koordinasi pengelolaan data dan layanan kepustakaan; dan pelaksanaan administrasi Biro.

Sasaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah “Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas”. Dalam mencapai hal tersebut diukur melalui indikator Indeks kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dengan target nilai 2,93 (skala 4). Realisasi yang dicapai yaitu 3,60 dengan persentase sebesar 123%, diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai atas aspek Implementasi (Bobot 33,33%), hasil: 99,47;
2. Nilai atas aspek Manfaat (Bobot 66,67%), hasil: 85,23.

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah menyusun 6 dokumen yang terdiri dari: Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Laporan Triwulan I, II, III, IV dan Laporan Tahunan 2022 sesuai dengan target perjanjian kinerja., dengan output yang dihasilkan antara lain: Nilai Keterbukaan Informasi Publik, Indeks SPBE, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Nilai SAKIP, Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku, Persentase tindak lanjut temuan BPK, Nilai Pengelolaan Arsip, Rasio Pegawai yang meningkat kinerjanya melalui CMC, dan Persentase tindak lanjut kerja atas temuan aduan dan saran penjaminan mutu. Kinerja Keuangan: dari alokasi anggaran Rp 2.955.107.000 direalisasikan Rp 2.941.196.639 (99,53%), dengan tercapainya semua target di tahun 2023, terdapat efisiensi sebesar Rp 13.910.361.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iii
IKHTISAR LAPORAN .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang (Maksud dan Tujuan) .....	1
1.2. Fungsi, Tugas dan Wewenang.....	2
1.3. Output dan Pengertian.....	5
1.3.1. Struktur Organisasi.....	5
1.3.2. Sumber Daya Manusia .....	6
BAB II RENCANA KINERJA .....	8
2.1. PENETAPAN KINERJA .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
3.1. ANALISIS KINERJA.....	11
3.2. CAPAIAN KINERJA .....	11
3.3. REALISASI ANGGARAN .....	16
3.4. KEBERHASILAN KINERJA (CAPAIAN).....	19
BAB IV PENUTUP .....	46
4.1 KESIMPULAN.....	46
LAMPIRAN .....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kinerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu alat untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKj), yang diatur dalam pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu instrumen utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Untuk pelaksanaan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi memiliki tiga Kelompok Kerja/Layanan yang saling bersinergi satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk mengusung efektifitas dan efisiensi dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya berbentuk anggaran.

Pada umumnya capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kinerja, namun kondisi sosial budaya yang dinamis dan perkembangan teknologi yang semakin maju, menuntut Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi untuk selalu melakukan peningkatan dan perbaikan kinerja yang terus menerus sehingga dapat beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi di era digital saat ini.

Keberhasilan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan

perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan yang dapat mempengaruhi organisasi dalam suatu proses perencanaan dan cara memecahkan permasalahan tersebut. Permasalahan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dapat dilihat dari aspek-aspek berikut;

- a. Terbatasnya sumber daya (Pegawai, Anggaran, Sarana-Prasarana dan lain-lain) yang tersedia untuk pengembangan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi; dan
- b. Belum tertibnya administrasi dalam lingkup internal sehingga memperlambat proses pelaksanaan kegiatan di Ombudsman RI.

Untuk pelaksanaan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi memiliki tiga Kelompok Kerja/Layanan yang saling bersinergi satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk mengusung efektifitas dan efisiensi dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya berbentuk anggaran sarana-prasarana, dan lain-lain. Pada umumnya capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kinerja, namun kondisi sosial budaya yang dinamis dan perkembangan teknologi yang semakin maju, menuntut Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi untuk selalu melakukan peningkatan dan perbaikan kinerja yang terus menerus sehingga dapat beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi, terutama yang terjadi pada ranah pelayanan publik di era digital saat ini. .

## **1.2. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang**

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi adalah sebuah unit kerja di dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia pada lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pengawas pelayanan

publik di Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang diatur dalam pasal 17 dan 18, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mengidentifikasi peran strategis Biro pada lembaga Ombudsman Republik Indonesia antara lain:

- a. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sebagai salah satu unit di Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan keberhasilan kinerja Ombudsman RI;
- b. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menjadi unit vital dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga dapat memberikan pelayanan dan dukungan optimal terhadap tercapainya keberhasilan kinerja organisasi;
- c. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi memiliki peranan penting dalam pelayanan publik khususnya terkait implementasi keterbukaan informasi publik;
- d. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menjadi penyedia dukungan teknologi informasi bagi unit-unit kerja di Ombudsman RI;
- e. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menjadi pengelola data dan informasi di organisasi; dan
- f. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan layanan perpustakaan yang menjadi salah satu sumber ilmu bagi Insan Ombudsman RI dan Masyarakat.

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan pada bagian kelima pasal 54 bahwa Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat dan pengelolaan teknologi informasi. Kemudian pada pasal 55 disebutkan bahwa Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat;

- b. pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
  - c. pengelolaan data dan layanan kepustakaan;
  - d. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan hubungan masyarakat dan teknologi informasi; dan
  - e. pelaksanaan administrasi Biro.
- A. Kelompok Kerja/Layanan Hubungan Masyarakat
- Kelompok Kerja/Layanan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi: Penyusunan pemberitaan, publikasi dan pengelolaan dokumentasi; Pengelolaan hubungan antar lembaga, dan Pengelolaan kemitraan strategis dan jejaring masyarakat.
- B. Kelompok Kerja/Layanan Data Informasi dan Teknologi Informasi
- Kelompok Kerja/Layanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi: Pengelolaan infrastruktur teknologi; Pengelolaan pengembangan aplikasi; Pengelolaan keamanan informasi dan jaringan; dan Pengelolaan data dan informasi.
- C. Kelompok Kerja/Layanan Kepustakaan
- Kelompok Kerja/ Layanan Kepustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan layanan kepustakaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi Pengelolaan data dan layanan kepustakaan.

### **1.3. Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia**

#### **1.3.1. Struktur Organisasi**

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi terdiri atas: a. Kepala Biro (setingkat Eselon II.a); b. Subbagian Tata Usaha (setingkat Eselon IV) ; c. Kelompok Jabatan Fungsional (Pranata Humas dan Pranata Komputer), dan d. Jabatan Pelaksana (JFU), dengan rincian sebagai berikut:

1) Kepala Biro

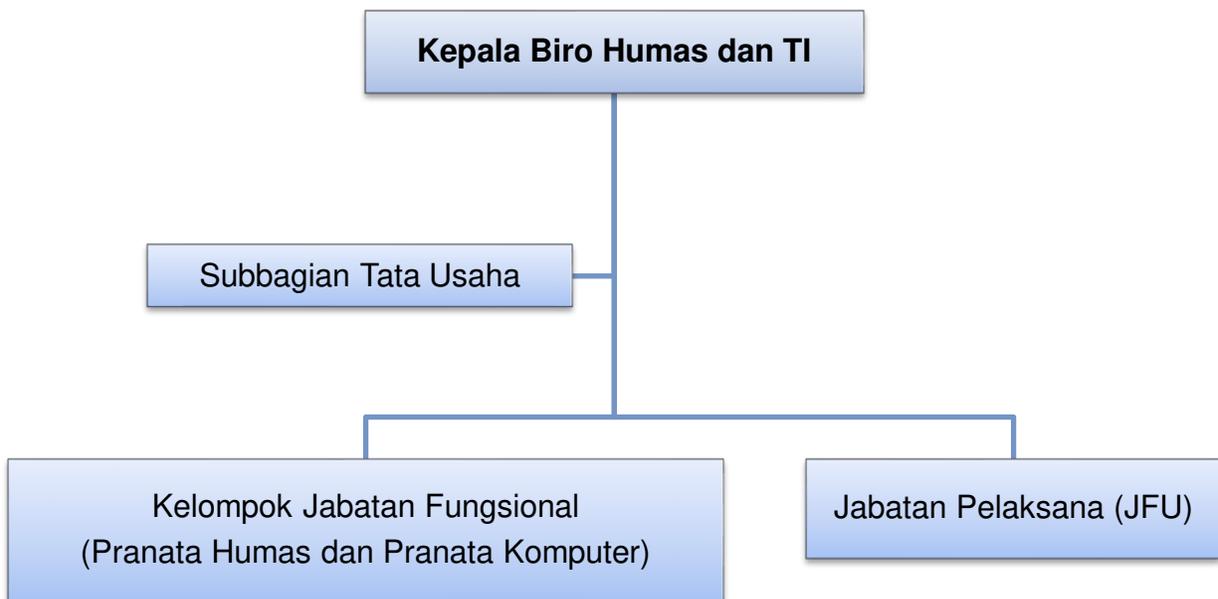
Kepala Biro memiliki tugas sebagai Kepala atau Pemimpin Unit Kerja setingkat Eselon II di Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha dan administrasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidangnya.



*Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi*

### 1.3.2. Sumber Daya Manusia

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi didukung sumber daya manusia sejumlah 38 orang, 6 diantaranya di Kantor Perwakilan sedangkan di Kantor Pusat sebanyak 31 orang terdiri atas: 1 orang Eselon II, 9 orang jabatan fungsional, 18

orang jabatan pelaksana (JFU), 1 orang Subbagian Tata Usaha dan 2 orang tenaga pendukung (Staf Sekretariat), dengan struktur dan rincian tugas/fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Biro : 1 Orang,
2. Kepala Subbagian Tata Usaha : 1 Orang,
3. Jabatan Fungsional Tertentu
  - Pranata Komputer* : 5 Orang,
  - Pranata Humas* : 4 Orang,
4. Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana
  - Kantor Pusat* : 19 Orang,
  - Kantor Perwakilan* : 6 Orang,
5. Tenaga Pendukung : 2 Orang.

No	Nama	Jabatan
1	Dodi Wahyugi	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
2	Heru Tjahjono	Pranata Humas Madya
3	M.A Junior Gregorius	Pranata Komputer Madya
4	Maharandy Fadlan Monoarfa	Pranata Humas Madya
5	Fuad Mushofa	Pranata Humas Madya
6	Anita Widyaning Putri	Pranata Humas Madya
7	Aprilistyo Dwi Hanafi	Pranata Komputer Muda
8	Firman Yudi Putra	Pranata Komputer Muda
9	Stefanus Lugas Prastowo	Pranata Komputer Muda
10	Indra Dwi Aprianto	Pranata Komputer Muda
11	Gosanna Oktavia Harianja	Kepala Subbagian Tata Usaha
12	Rani Sabtelasari	Analisis Sistem Informasi
13	Nurul Istiamuji	Analisis Humas
14	Yemima Dwi Kurnia	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi
15	Siti Fatimah	Pengelola Administrasi Pemerintahan

16	Muhammad Fatra Dasa Mura	Analisis Jurnalis
17	Gunawan Riyanto	Analisis Sistem Informasi
18	Ganjar Yoga Supratama	Analisis Sistem Informasi
19	Bayu Victoria Warman	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi
20	Nurwalid Akhri Hidayat	Pengelola Sistem dan Jaringan
21	Fefa Bianca Belladina	Pengelola Sistem dan Jaringan
22	Muhammad Ridho	Operator Komputer Grafis
23	Eko Wahyu Wijiantoro	Pengelola Pengadministrasi Negara
24	Zenia Annabel	Pengawas Perpustakaan
25	Tengku Reza Pahlepi	Pengelola Data
26	Imanda Kartika Sari	Analisis Hubungan antar Lembaga
27	Hasti Aulia	Jurnalis
28	Yasin Jauhari	Pranata Teknologi Informasi Komputer
29	Victor Riandani Iwisara	Pengelola Administrasi Pemerintahan
30	Soesilowaty Widarshanty	Staf Sekretariat/ Tenaga Pendukung
31	Zaenal Arifin	Staf Sekretariat/ Tenaga Pendukung
32	Tety Yuniarty	Analisis Sistem Informasi
33	<i>Abdul Latif (Jambi)</i>	<i>Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat</i>
34	<i>Reihana Ferdian (Jambi)</i>	<i>Analisis Humas</i>
35	<i>Oktavuri R.P (Maluku)</i>	<i>Analisis Publikasi</i>
36	<i>Marisya Fadhila (Sumbar)</i>	<i>Pengelola Instalasi Teknologi Informasi</i>
37	<i>Intan Dewi (Bengkulu)</i>	<i>Pengelola Sistem dan Jaringan</i>
38	<i>Arwifan Arsyad (Sulsel)</i>	<i>Pengelola Teknologi Informasi</i>

*Daftar nama Pegawai dan Jabatan di Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi (Kantor Pusat dan Perwakilan)*

## BAB II

### RENCANA KINERJA

#### 2.1. Penetapan Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi serta struktur organisasi. Program dan Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi terdiri dari 3 (tiga) Layanan, yaitu: Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Data dan Informasi (Data Informasi dan Teknologi Informasi), dan Layanan Perpustakaan (Umum). Melaksanakan sasaran kegiatan, indikator, dan target sesuai Perjanjian Kinerja. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi yang diwakili oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah menandatangani Perjanjian Kinerja (unit eselon II).

#### Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi - Aspek Implementasi (33,3%) 1. Capaian Rincian Output 2. Nilai Efisiensi Unit Kerja 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 4. Penyerapan Anggaran  - Aspek Manfaat (66,7%)	2,93 (Skala 4)
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan	

Dalam perjanjian kinerja tersebut, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi memiliki 2 indikator kinerja, yakni indeks kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dengan target skala 2,93 dari indeks 4, serta Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan dengan target 6 Dokumen.

1. Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi  
Terdiri dari Aspek Implementasi (33,3%) dan Aspek Manfaat (66,7%). Berikut rincian aspek implementasi dan aspek manfaat:

Aspek Implementasi Biro Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

<b>Aspek Implementasi</b>	<b>Bobot</b>
Capaian Rincian Output	43,5%
Nilai Efisiensi Unit Kerja	28,6%
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	18,2%
Penyerapan Anggaran	9,7%
<b>Total Nilai Aspek Implementasi</b>	<b>100%</b>

Aspek Manfaat Biro Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

<b>Aspek Manfaat</b>	<b>Bobot</b>	<b>Target</b>
Nilai keterbukaan informasi publik	25%	88
Indeks SPBE	20%	2,75
Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Humas dan TI	20%	3
Nilai SAKIP Biro Humas dan TI	10%	75
Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Biro Humas dan TI	5%	B
Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Biro Humas TI	5%	100%
Nilai pengelolaan arsip Biro Humas TI	5%	75,26
Rasio pegawai yang meningkatkan kinerjanya melalui <i>coaching/mentoring/counseling</i> (CMC)	5%	75%
Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu	5%	100%
<b>Total Nilai Aspek Manfaat</b>	<b>100%</b>	

2. Jumlah Dokumen Laporan Triwulan/Tahunan  
Terdiri dari laporan triwulan I, II, III dan IV Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi tahun 2023, Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2022, serta Laporan Tahunan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2022.

Perjanjian kinerja ini kemudian akan dievaluasi setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran. Realisasi perjanjian kinerja ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perjanjian kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi - Aspek Implementasi (33,3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	2,93
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6

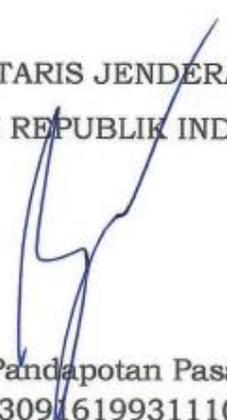
KRO/RO	Anggaran
KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 2.475.107.000,00
RO1 : Layanan Hubungan Masyarakat	Rp. 765.257.000,00
RO2 : Layanan Umum	Rp. 213.757.000,00
RO3 : Layanan Data dan Informasi	Rp. 1.496.093.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.475.107.000,00</b>

Jakarta,

Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO  
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN  
TEKNOLOGI INFORMASI,

  
Suganda Pandapotan Pasaribu  
NIP. 197309161993111001

  
Wanton Sidauruk  
NIP. 196610061995031001

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Analisis Kinerja

Berikut Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2023:

#### Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi - Aspek Implementasi (33,3%) 1. Capaian Rincian Output 2. Nilai Efisiensi Unit Kerja 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 4. Penyerapan Anggaran - Aspek Manfaat (66,7%)	2,93 (Skala 4)	3,60 (Skala 4)
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan	6	6

Pengukuran kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diharapkan. Untuk menghitung indeks kinerja Biro dilakukan pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja Kelompok Kerja/Layanan pada Biro Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Perjanjian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah terealisasi melebihi target yang telah ditentukan.

#### 3.2. Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi didapatkan dari realisasi atas perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada awal tahun 2023, sehingga kinerja Biro *measureable* dan *accountable*.

Berikut perhitungan capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi:

a. Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Perhitungan Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi berdasar pada aspek implementasi dengan bobot 33,3% dan aspek manfaat dengan bobot 66,7%.

Aspek implementasi diukur dengan memperhatikan capaian rincian output (43,5%), nilai efisiensi unit kerja (28,6%), konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (18,2%), dan penyerapan anggaran (9,7%).

Sedangkan Aspek manfaat diukur dengan memperhatikan Nilai keterbukaan informasi publik (25%), Indeks SPBE (20%), Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Humas dan TI (20%), Nilai SAKIP Biro Humas dan TI (10%), Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Biro Humas dan TI (5%), Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Biro Humas TI (5%), Nilai pengelolaan arsip Biro Humas TI (5%), Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui *coaching/mentoring/counseling* (CMC) (5%), dan Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu (5%).

Berikut realisasi atas indikator-indikator di atas:

Nilai Aspek Implementasi (Bobot 33,3%)

Aspek Implementasi	Bobot	Realisasi	NILAI (Bobot x Realisasi)
Capaian Rincian Output	43,5%	120,60%	17,09%
Nilai Efisiensi Unit Kerja	28,6%	66,97%	87,90%
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	18,2%	100,00%	100,00%
Penyerapan Anggaran	9,7%	99,53%	2,21%
<b>Total Nilai Aspek Implementasi</b>	<b>100%</b>		<b>99,47</b>

Pada aspek implementasi, realisasi Capaian Rincian Output sebesar 120,60% dengan bobot 43,5% sehingga nilai yang diambil dari Capaian Rincian Output sebesar 17,09. Realisasi Nilai Efisiensi Unit Kerja sebesar 66,97% dengan bobot 28,6% sehingga nilai yang diambil dari Nilai Efisiensi Unit Kerja sebesar 87,90. Realisasi Konsistensi Penyerapan Anggaran sebesar 100,00% dengan bobot 18,2% sehingga nilai yang diambil dari Konsistensi Penyerapan Anggaran sebesar 100,00. Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 99,53% dengan bobot 9,7%

sehingga nilai yang diambil dari Penyerapan Anggaran sebesar 2,21. Total nilai Aspek Implementasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sebesar **99,47**.

### Capaian Rincian Output

Capaian RO		Mar	Jun	Sep	Des
<b>4192</b>	<b>Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi</b>	<b>25,63%</b>	<b>54,72%</b>	<b>86,48%</b>	<b>120,60%</b>
4192.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	26,89%	64,15%	109,43%	161,79%
4192.EBA.962	Layanan Umum	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
4192.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%

### Capaian Rincian Output Tahun 2023

### Nilai Efisiensi Unit Kerja

Nilai Efisiensi		Mar	Jun	Sep	Des
<b>4051</b>	<b>Perencanaan dan Keuangan</b>	<b>94,29%</b>	<b>100,00%</b>	<b>61,77%</b>	<b>66,97%</b>
<b>4051.EBD.952</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>				
	Penyerapan	13,74%	36,74%	52,60%	99,13%
	Capaian RO	26,89%	64,15%	109,43%	161,79%
	Capaian RO yang diperhitungkan	26,89%	64,15%	109,43%	120,00%
	Efisiensi	13,15%	27,41%	56,84%	20,87%
	Efisiensi yang diperhitungkan	13,15%	20,00%	20,00%	20,00%
	<b>Nilai Efisiensi</b>	<b>82,88%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>4051.EBD.953</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>				
	Penyerapan	3,73%	19,77%	87,57%	99,82%
	Capaian RO	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	Capaian RO yang diperhitungkan	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	Efisiensi	21,27%	30,23%	-12,57%	0,18%
	Efisiensi yang diperhitungkan	20,00%	20,00%	-12,57%	0,18%
	<b>Nilai Efisiensi</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,57%</b>	<b>50,46%</b>
<b>4051.EBD.955</b>	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>				
	Penyerapan	2,67%	18,15%	68,31%	99,82%
	Capaian RO	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	Capaian RO yang diperhitungkan	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	Efisiensi	22,33%	31,85%	6,69%	0,18%
	Efisiensi yang diperhitungkan	20,00%	20,00%	6,69%	0,18%
	<b>Nilai Efisiensi</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,74%</b>	<b>50,45%</b>

### Nilai Efisiensi Unit Kerja Tahun 2023

### Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan

Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan		Mar	Jun	Sep	Des
<b>4192</b>	<b>Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
4192.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	100%	100%	100%	100%
4192.EBA.962	Layanan Umum	100%	100%	100%	100%
4192.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	100%	100%	100%	100%

#### Konsistensi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

### Penyerapan Anggaran

Penyerapan Anggaran		Mar	Jun	Sep	Des
<b>4192</b>	<b>Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi</b>	<b>7,41%</b>	<b>26,10%</b>	<b>63,08%</b>	<b>99,53%</b>
4192.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	13,74%	36,74%	52,60%	99,13%
4192.EBA.962	Layanan Umum	3,73%	19,77%	87,57%	99,82%
4192.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2,67%	18,15%	68,31%	99,82%

#### Penyerapan Anggaran Tahun 2023

#### Nilai Aspek Manfaat (Bobot 66,7%)

Aspek Manfaat	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Nilai (Bobot x Realisasi)
Nilai keterbukaan informasi publik	25%	88	94,37	<b>94,37%</b>	23,5925
Indeks SPBE	20%	2,75	3,75	<b>75%</b>	15
Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Humas dan TI	20%	3	3,24	<b>81%</b>	16,2
Nilai SAKIP Biro Humas dan TI	10%	75	73,75	<b>73,75%</b>	7,375
Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Biro Humas dan TI	5%	B	A	<b>100%</b>	5
Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Biro Humas TI	5%	100%	74,88%	<b>74,88%</b>	3,744
Nilai pengelolaan arsip Biro Humas TI	5%	75,26	86,4	<b>86,40%</b>	4,32
Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui <i>coaching/mentoring/counseling</i> (CMC)	5%	75%	100	<b>100%</b>	5

Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu	5%	100%	100	<b>100%</b>	5
<b>Total Nilai Aspek Manfaat</b>	<b>100%</b>				<b>85,23</b>

Pada Aspek Manfaat, realisasi Nilai atas Nilai keterbukaan informasi publik 94,37 atau 94,37% dari target 88, nilai yang diambil dari indikator sebesar 25% dari 94,37%, yakni 23,59.

Realisasi Indeks SPBE 3,75 atau 75% dari target 2,75, nilai yang diambil dari indikator Indeks SPBE sebesar 20% dari 3,75, yakni 15.

Realisasi Nilai Kepuasan Pengguna Layanan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi 3,24 atau 81% dari target 2,75, nilai yang diambil dari indikator Nilai SAKIP sebesar 20% dari 3,24, yakni 16,2.

Realisasi Nilai SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi 73,75 atau 73,75% dari target 75, nilai yang diambil dari indikator Nilai RB sebesar 10% dari 73,75, yakni 7,375.

Realisasi Tingkat Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku di Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi A atau 100% dari target B, nilai yang diambil dari indikator sebesar 5% dari 100 yakni 5.

Realisasi Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terhadap Pegawai pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi 74,88 atau 74,88% dari target 100%, nilai yang diambil dari indikator sebesar 5% dari 74,88% yakni 3,744.

Realisasi Nilai Pengelolaan Arsip Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi 86,40 (Skala 100) atau 86,40% dari target 75,26 (Skala 100), nilai yang diambil dari indikator sebesar 5% dari 86,40% yakni 4,32.

Realisasi Rasio Pegawai yang Meningkatkan Kinerjanya melalui Coaching/ Mentoring/ Counseling (CMC) 100 atau 100% dari target 75, nilai yang diambil dari indikator sebesar 5% dari 100% yakni 5.

Realisasi Persentase Tindak Lanjut Unit Kerja atas Temuan Aduan, dan Saran Penjaminan Mutu 100 atau 100% dari target 100, nilai yang diambil dari indikator sebesar 100% dari 100% yakni 5.

Total nilai Aspek Manfaat pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi senilai **85,23**.

Dokumen hasil kinerja atas aspek implementasi kinerja capaian output sebagai berikut:

1. Layanan Hubungan Masyarakat

Laporan Pengelolaan Media Sosial, Laporan Pengelolaan Call Center, Laporan Pengelolaan Website, Laporan Pengelolaan Media Monitoring, Laporan Dokumentasi dan Peliputan, Laporan Indeks Kepuasan Layanan Informasi,

Laporan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Laporan Triwulan I, II, III, IV Layanan Hubungan Masyarakat, Laporan Tahunan Layanan Hubungan Masyarakat.

2. Layanan Data dan Informasi (Data Informasi dan Teknologi Informasi)

Laporan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, Laporan Pengelolaan Keamanan Jaringan, Laporan Pengelolaan Pengembangan Aplikasi, Laporan Pengelolaan SPBE, Laporan Pengelolaan Sisdatin, Laporan, Laporan Triwulan I, II, III, IV Layanan Data dan Informasi, Laporan Tahunan Layanan Data dan Informasi.

3. Layanan Perpustakaan (Umum)

Laporan Pembangunan Pojok Baca Ombudsman (PBO), Laporan Pembangunan Pojok Baca Digital (Pocadi), Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Perpustakaan, Laporan Triwulan I, II, III, IV Layanan Perpustakaan, Laporan Tahunan Layanan Perpustakaan.

Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Bobot	Realisasi	NILAI
			$\frac{(Bobot \times 4) \times Realisasi}{100}$
Aspek Implementasi	33,3%	99,47	1,32
Aspek Manfaat	66,7%	85,23	2,27
<b>TOTAL Nilai Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi</b>			<b>3,60</b>

Berdasarkan perhitungan sebelumnya telah diketahui bahwa total nilai Aspek Implementasi 99,47 dan total nilai Aspek Manfaat 85,23. Sehingga dapat dilakukan perhitungan Nilai Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dengan memasukkan rumus:

$$\frac{(Bobot \times 4) \times Realisasi}{100}$$

Didapatkan nilai yang diambil dari Aspek Implementasi sebesar 1,32 dan Aspek Manfaat sebesar 2,27. Total Nilai Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sebesar **3,60** dari skala 4 atau sebesar 123% ada kenaikan 23% dari target 2,93 dengan indeks skala 4.

b. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan

Pada Tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah Menyusun 6 Dokumen Pelaporan yang terdiri dari: Laporan Triwulan I Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2023, Laporan Triwulan II

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2023, Laporan Triwulan III Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2023, Laporan Triwulan IV Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2023, Laporan Tahunan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2022, dan Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2022.

Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	2,93 (Skala 4)	3,60 (Skala 4)	123%	2,9 (Skala 4)	3,47 (Skala 4)	119%
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/ Tahunan	6	6	100%	5	5	100%

Biro Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Indeks Kinerja (Skala 4) Aspek Implementasi: 33,33% Aspek Manfaat: 66,67%	2,83	2,95	3,03	3,08	3,15	3,25	3,31	3,33	3,33	3,45	3,51	3,60
Aspek Implementasi (%)	42,01	50,99	57,03	60,51	65,69	73,13	77,95	79,51	79,60	88,06	92,99	99,47
Aspek Manfaat (%)	85,23	85,23	85,23	85,23	85,23	85,23	85,23	85,23	85,23	85,23	85,23	85,23

Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi di Tahun 2022 dan 2023, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kebijakan yang baru diterapkan Ombudsman

Republik Indonesia di tahun 2023 ini.

a. Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Realisasi Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2023 sebesar 3,60 (Skala 4) dari target 2,93 (Skala 4) dengan capaian 123%, sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 3,47 (Skala 4) dari target 2,9 (Skala 4) dengan capaian 119%.

Pada tahun 2023 ini, digunakan rumusan perhitungan baru dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atas hal tersebut maka perhitungan Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2023 dipengaruhi oleh dua aspek, yakni Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat. Sedangkan Tahun 2022 dengan perhitungan yang sama juga, yaitu: dipengaruhi oleh dua aspek, yakni Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat.

b. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan

Realisasi Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan Tahun 2022 dan 2023 sebesar 6 dokumen dari target 6 dokumen dengan capaian 100%.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada Pagu Awal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Pagu Awal dan Akhir Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi TA. 2023*

KODE	URAIAN	RENJA 2023		
		VOL	SAT	PAGU
<b>4192</b>	<b>Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi</b>			<b>2.955.107.000</b>
4192.EBA.95	Layanan Hubungan Masyarakat	212	Laporan	1.245.257.000
4192.EBA.96	Layanan Umum	1	Layanan	213.757.000
4192.EBA.96	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.496.093.000

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2023 ini Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi (*Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi – Layanan Dukungan Manajemen Internal*) Ombudsman Republik Indonesia didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 sebesar Rp 2.955.107.000. Dengan jumlah anggaran yang diblokir (Automatic Adjustment) senilai Rp 0 (tidak ada), sehingga anggaran yang bisa digunakan senilai Rp 2.955.107.000.

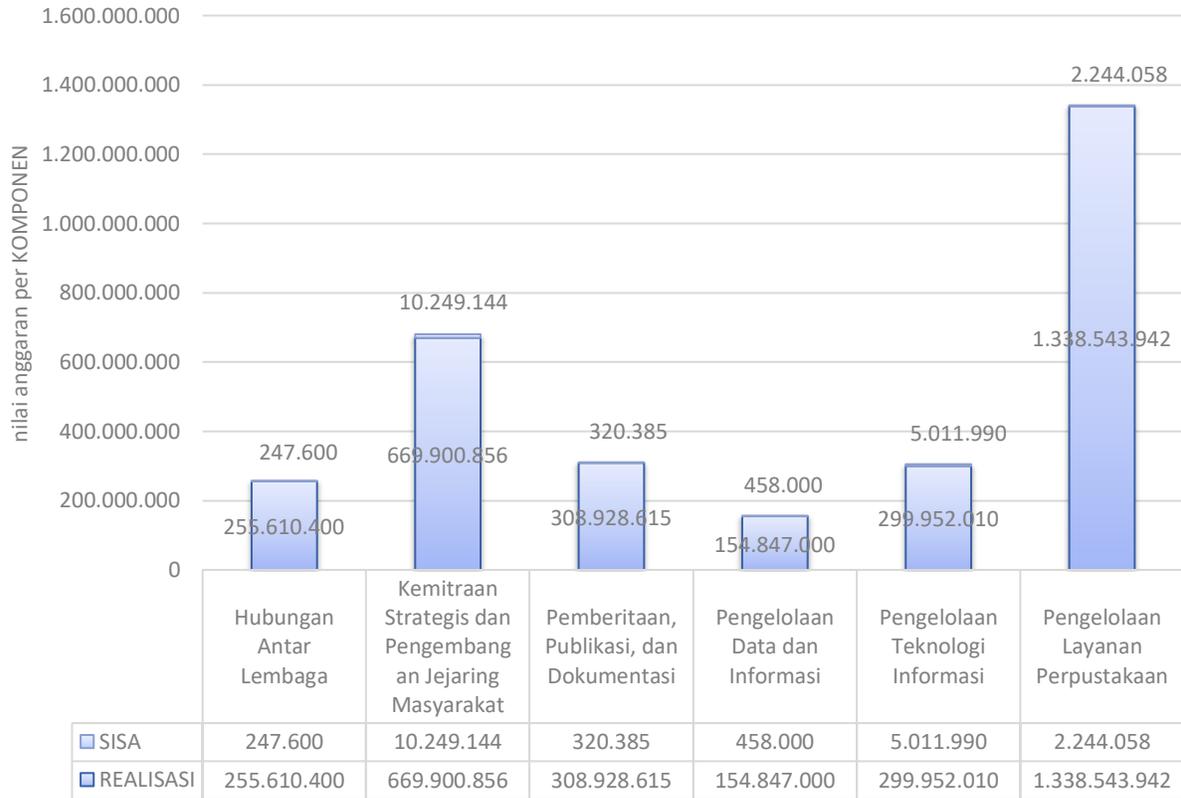
Realisasi atau penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.941.196.639 atau sebesar 99,53% (Data Realisasi SAS berdasarkan aplikasi SAKTI). Realisasi anggaran unit kerja tertinggi nomor 1 dari seluruh Dukungan Manajemen, dan tertinggi nomor 2 untuk realisasi tingkat keseluruhan. Berikut adalah rincian Pagu, Realisasi, dan Sisa Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV sebagai berikut:

*Realisasi Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi TA 2023*

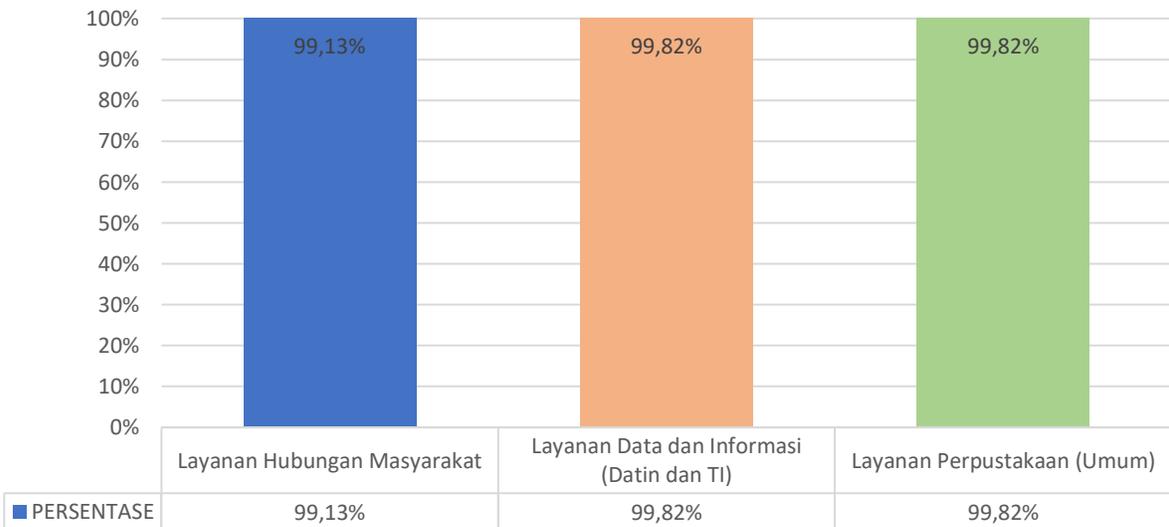
REALISASI KESELURUHAN (Penyerapan sampai 31 Desember 2023)				
Kode	Uraian	Pagu Setelah Blokir	Realisasi	%
ORI	Ombudsman Republik Indonesia	239,573,649,000	228,367,242,308	95.32%
PPPP	Program Pengawasan Pelayanan Publik	40,006,208,000	38,039,603,385	95.08%
01	Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	23,115,892,000	22,477,960,990	97.24%
02	Pencegahan Maladministrasi	16,490,316,000	15,161,821,047	91.94%
03	Penjaminan Mutu	400,000,000	399,821,348	99.96%
PDM	Program Dukungan Manajemen	13,132,165,000	12,704,810,843	96.75%
01	Perencanaan dan Keuangan	2,346,907,000	2,311,301,295	98.48%
02	Fasilitasi Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik	1,317,124,000	1,304,679,401	99.06%
03	Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2,955,107,000	2,941,196,639	99.53%
04	Pengawasan Internal	726,216,000	705,267,923	97.12%
05	Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	3,469,263,000	3,435,780,218	99.03%
06	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, Dan Kerumahtanggaan	2,317,548,000	2,006,585,367	86.58%
BOP	Biaya Operasional, Sarana Prasarana, Dan Layanan SDM	186,435,276,000	177,622,828,080	95.27%
01	Gaji dan Tunjangan	95,481,844,000	91,935,271,619	96.29%
02	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	73,462,781,000	69,970,673,863	95.25%
03	Sarana dan Prasarana Internal	10,414,710,000	9,498,972,137	91.21%
04	Layanan Manajemen SDM (Rekrutmen, Administrasi SDM)	2,838,270,000	2,445,784,783	86.17%
05	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	4,237,671,000	3,772,125,678	89.01%

Uraian	pagu	realisasi sa	sis	%
4192 Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2,955,107,000	2,941,196,639	13,910,361	99.53%
4192.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,955,107,000	2,941,196,639	13,910,361	99.53%
958 Layanan Hubungan Masyarakat	1,245,257,000	1,234,439,871	10,817,129	99.13%
051 Hubungan Antar Lembaga	255,858,000	255,610,400	247,600	99.90%
A Media Relation	37,950,000	37,750,000	200,000	99.47%
B Media Monitoring	115,008,000	115,000,000	8,000	99.99%
C Fasilitasi Koordinasi Antar Lembaga	102,900,000	102,860,400	39,600	99.96%
052 Kemitraan Strategis dan Pengembangan Jejaring Masyarakat	680,150,000	669,900,856	10,249,144	98.49%
A Sosialisasi oleh Perwakilan	510,000,000	500,208,943	9,791,057	98.08%
B Kampanya/Edukasi Publik	63,000,000	62,602,000	398,000	99.37%
C Pengelolaan Layanan Informasi Publik	107,150,000	107,089,913	60,087	99.94%
053 Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi	309,249,000	308,928,615	320,385	99.90%
A Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan	75,900,000	75,774,506	125,494	99.83%
B Pengelolaan Call Center dan Whatsapp Center	27,000,000	26,809,882	190,118	99.30%
C Pengelolaan Website	158,397,000	158,396,000	1,000	100.00%
D Pengelolaan Media Sosial	29,364,000	29,360,227	3,773	99.99%
E Publikasi Khusus	18,588,000	18,588,000	-	100.00%
962 Layanan Umum	213,757,000	213,365,826	391,174	99.82%
051 Pengelolaan layanan perpustakaan	213,757,000	213,365,826	391,174	99.82%
A Pengelolaan Perpustakaan	62,437,000	62,125,655	311,345	99.50%
B Pojok Baca Ombudsman	146,520,000	146,440,171	79,829	99.95%
C Perpustakaan Digital (E-Library)	4,800,000	4,800,000	-	100.00%
963 Layanan Data dan Informasi	1,496,093,000	1,493,390,942	2,702,058	99.82%
051 Pengelolaan Data dan Informasi	155,305,000	154,847,000	458,000	99.71%
A Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi	51,985,000	51,577,000	408,000	99.22%
B Satu Data Ombudsman	103,320,000	103,270,000	50,000	99.95%
052 Layanan Pengelolaan Teknologi Informasi	1,340,788,000	1,338,543,942	2,244,058	99.83%
A Pemeliharaan Data Center	151,268,000	150,832,599	435,401	99.71%
B Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	60,500,000	60,297,000	203,000	99.66%
C Pemeliharaan, Monitoring, dan Evaluasi Aplikasi/Sistem Informasi	21,250,000	21,250,000	-	100.00%
D Layanan Monitoring dan Evaluasi SPBE	80,940,000	80,770,000	170,000	99.79%
E Pemeliharaan Jaringan VPN	64,900,000	64,889,971	10,029	99.98%
G Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL)	861,930,000	860,754,372	1,175,628	99.86%
H Pengembangan Aplikasi Whistle Blowing System	100,000,000	99,750,000	250,000	99.75%

### Diagram Realisasi Anggaran Biro Hubungan Masyarakat Dan Teknologi Informasi 2023



### PERSENTASE REALISASI ANGGARAN



Tabel di atas menggambarkan Realisasi atau penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.941.196.639 atau sebesar 99,53% dari total PAGU Anggaran senilai Rp Rp 2.955.107.000, dengan rincian

1. Layanan Hubungan Masyarakat dengan pagu Rp 1.245.257.000 terealisasi sebesar Rp 1.234.439.871 (99,13%), sisa/efisiensi Rp 10.817.129.
2. Layanan Data dan Informasi (Pengelolaan Data dan Informasi, dan Teknologi Informasi) dengan pagu Rp 1.496.093.000 terealisasi sebesar Rp 1.493.390.942 (99,82%), sisa/efisiensi Rp 2.702.058.
3. Layanan Perpustakaan (Umum) dengan pagu Rp 213.757.000 terealisasi sebesar Rp 213.365.826 (99,82%), sisa/efisiensi Rp 391.174.

### **3.4. Keberhasilan Kinerja (Pencapaian)**

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada tahun 2023 mencapai dan berhasil dalam melaksanakan kegiatan dan penghargaan, yaitu diantaranya:

#### **3.4.1. Kelompok Kerja/Layanan Hubungan Masyarakat**

##### **1. Media Monitoring Pemberitaan Ombudsman RI (1 Januari – 31 Desember 2023)**

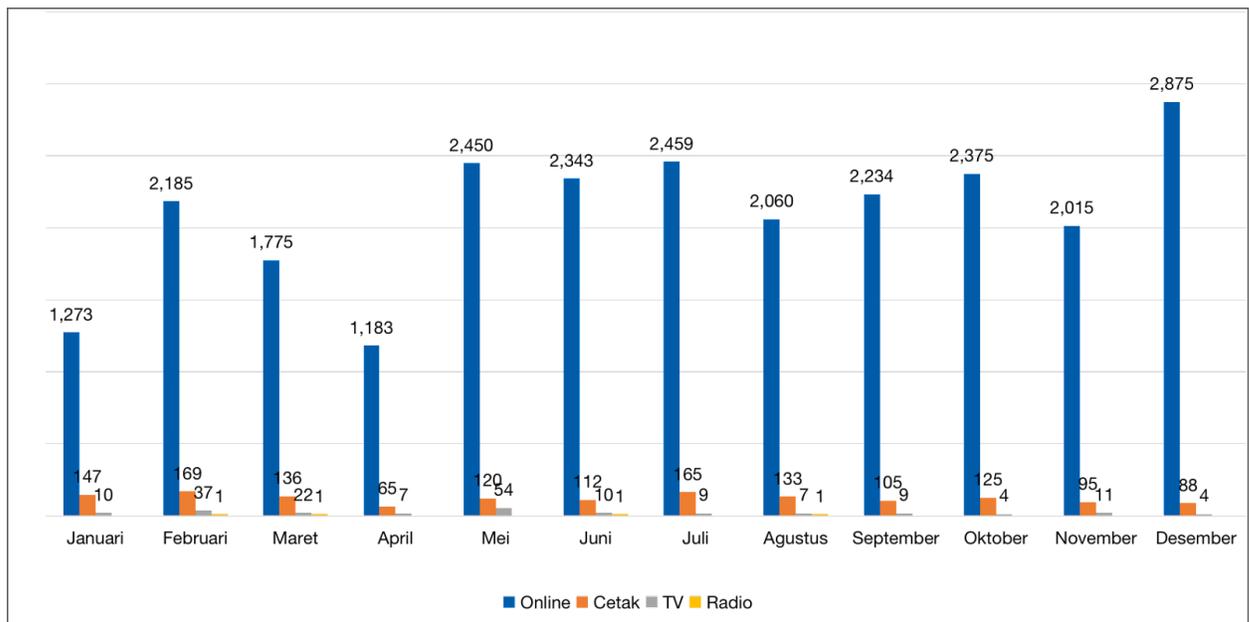
Selama periode 1 Januari-31 Desember 2023 terpantau pemberitaan terkait Ombudsman RI muncul dalam **26.808 artikel berita** dengan sebaran 25.160 artikel berita dari media online, 1.460 artikel berita dari media cetak, 184 berita media tv, dan 4 siaran media radio. Tiga isu yang menjadi fokus utama media yaitu Anugerah Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik 2022, Ombudsman RI Perwakilan Rilis Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023, Jumlah Peraih Zona Hijau Naik.

Terpantau jumlah ekspos pemberitaan Ombudsman RI tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan total ekspos 2.966 dengan isu yang memicu yakni Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023, Jumlah Peraih Zona Hijau Naik, serta penguatan Lembaga Ombudsman Disebut dalam Debat Calon Presiden Putaran I. Dari total 26.808 berita, dominasi ulasan isu terkait Ombudsman RI merupakan pemberitaan bersentimen positif dengan 20.278 (76%), lalu 6.503 artikel bersentimen netral (24%) dan 27 artikel bersentimen negatif (0,1%). Pada periode Januari – Desember 2021 muncul pemberitaan negatif dengan 3 isu utama yaitu, Ombudsman RI Diduga Lakukan Maladministrasi pada Seleksi Kepala Perwakilan, ICW 'Mengendus' Kongkalikong Kemendagri dengan Ombudsman

soal Pemilihan Pj Gubernur, serta Wali Murid SDN Pocin 1 Kecewa Ombudsman Sarankan Mediasi.

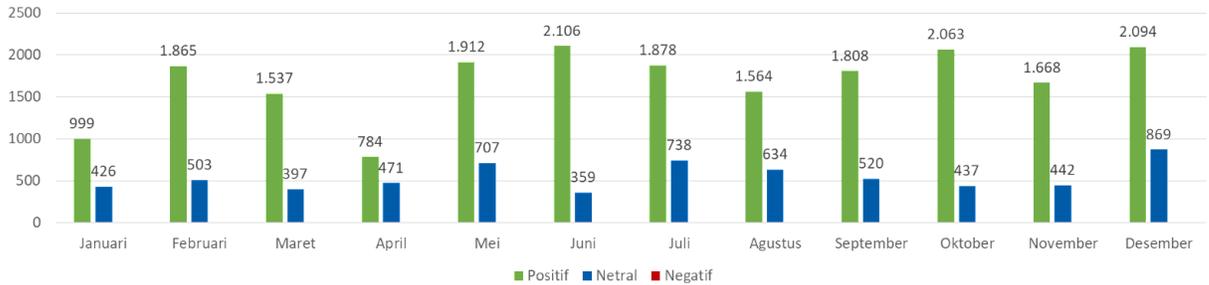
Top 3 influencer internal yang aktif direplikasi oleh media massa di antaranya Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dengan 4.902 kutipan, Anggota Ombudsman RI Mokh. Najih dengan 4.761 kutipan, dan Anggota Ombudsman RI, Robertus Na Endi Jaweng dengan 1.878 kutipan. Pemberitaan Ombudsman Perwakilan Daerah yang menempati posisi teratas yakni ditempati oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara dengan 2.242 ekspos. Pada posisi kedua yakni Ombudsman RI Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dengan 1.123 ekspos, dan pada posisi ketiga teratas ditempati oleh Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau dengan 903 ekspos berita.

Grafik berikut menunjukkan perbandingan total ekspos pemberitaan yang dikutip dari media periode 1 Januari-31 Desember 2023

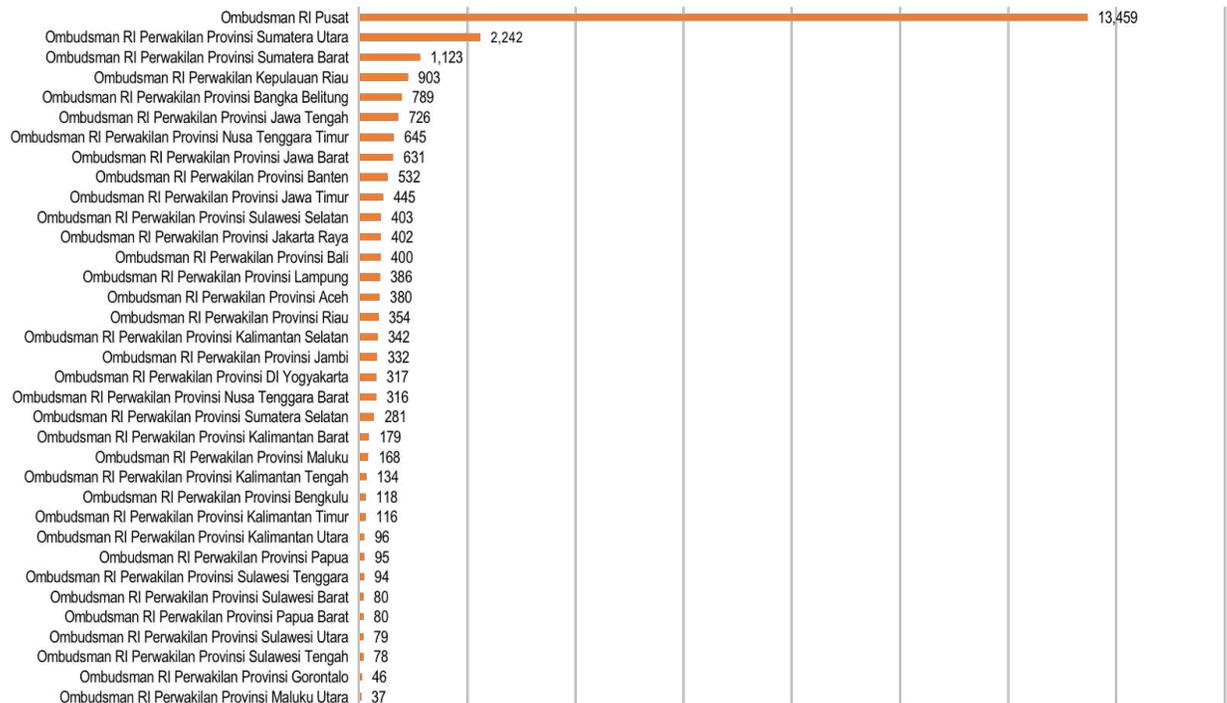


*Ekspos Pemberitaan Ombudsman RI Periode Januari - Desember 2023*

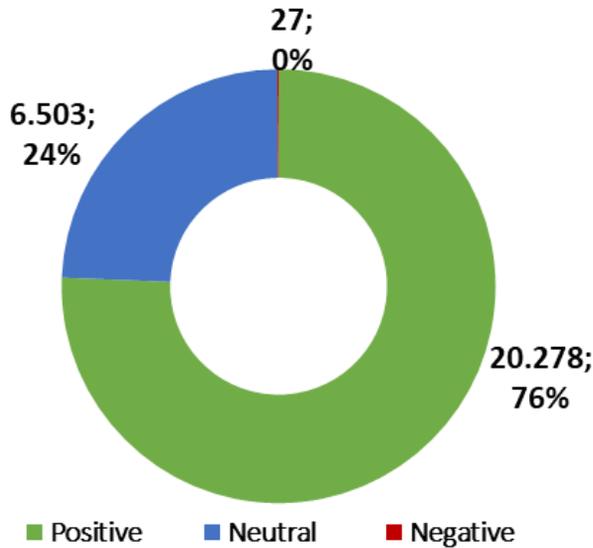
Ulasan seputar Penganugerahan Kepatuhan Pelayanan Publik menjadi fokus utama media online dan media cetak. Media online tribunews.com menjadi media teraktif pada platform media online, media Kompas pada media Cetak, dan Kompas TV pada media televisi. Sedangkan pada media radio secara merata dengan masing-masing satu pemberitaan dari Xchannel Jakarta 93.6 FM, RRI Pro 1 Cirebon 94,8 FM, Elshinta 90.0 FM, dan RRI Pro 3 88.8 FM. Grafik berikut menunjukkan perbandingan total ekspos pemberitaan yang dikutip dari media periode 1 Januari-31 Desember 2023 pada Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan.



Tren Pemberitaan Ombudsman Periode 1 Januari-31 Desember 2023



Terantau tren pemberitaan Ombudsman RI pada tahun 2023 mengalami peningkatan baik pada pemberitaan terkait Ombudsman RI pusat, serta Ombudsman RI perwakilan. Pada 2023 jumlah pemberitaan yang cukup signifikan sejak Januari hingga Desember dipicu tingginya fokus media Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023.



*Sentimen Pemberitaan Ombudsman Periode 1 Januari-31 Desember 2023*

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, citra Ombudsman RI di media dapat dikatakan tergolong positif dan minim isu negatif yang menyerang. Isu negatif didominasi oleh pemberitaan Ombudsman RI Diduga Lakukan Maladministrasi pada Seleksi Kepala Perwakilan dengan 4 ekspos berita. Di lain pihak, figur-figur pendukung Ombudsman RI terpantau juga tidak kalah aktif direplikasi oleh media.

**Top 20 Isu Pemberitaan**



*Top 20 Isu Pemberitaan Ombudsman Periode 1 Januari-31 Desember 2023*

Secara keseluruhan, Ombudsman RI mendapat citra yang baik dalam persepsi media saat merespons suatu isu. Jika melihat dari tren top 20 isu pemberitaan

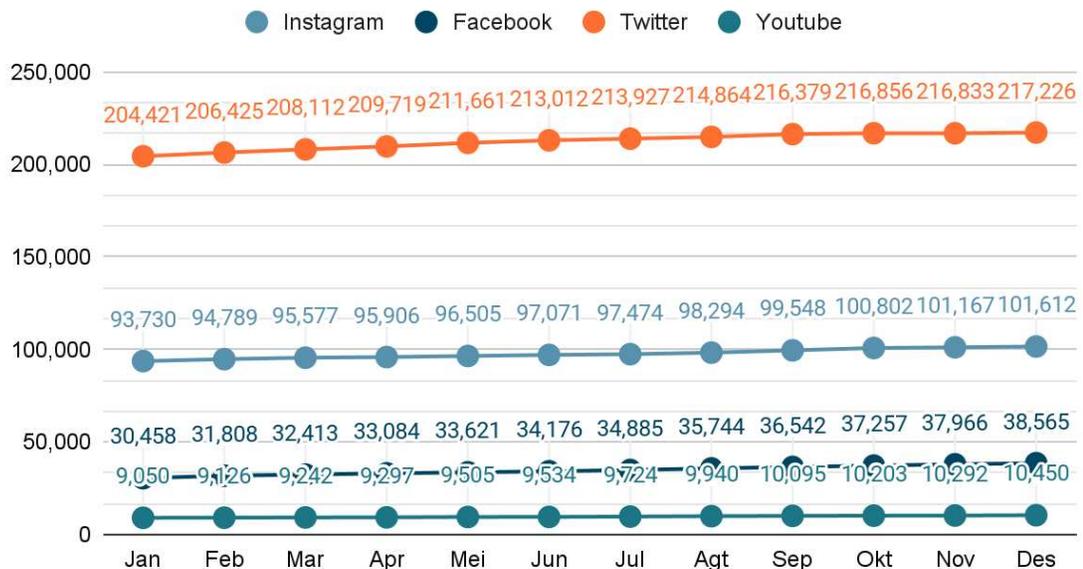
Ombudsman RI selama 2023, topik-topik yang lebih mendapat perhatian media yakni topik-topik yang menunjukkan keberhasilan kinerja Ombudsman RI dalam menyelidiki dan menindaklanjuti penemuan-penemuan potensi maladministrasi di beberapa penyelenggara pelayanan publik.

## 2. Pengelolaan Media Sosial

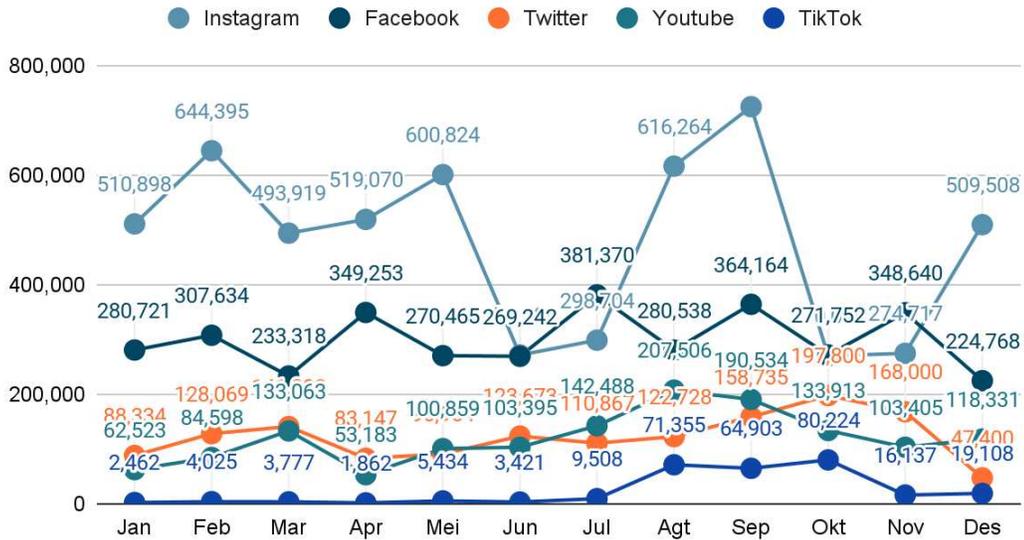
Selama tahun 2023, terjadi kenaikan performa media sosial Ombudsman RI yang bisa dilihat dari kenaikan jumlah *followers* (pengikut) dengan total sebesar 8.652 di Instagram, 8.627 di Facebook, 14.493 di Twitter, 1.501 di Youtube, 4.577 di TikTok. Pada kanal Instagram, kenaikan tertinggi terjadi pada bulan September dan Oktober dikarenakan adanya aktivitas digital activation dan supporting ads. Pada kanal Facebook, kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2023 yang disebabkan oleh supporting ads. Konversi ads cukup tinggi pengaruh dari materi ads berupa gimmick terkait edukasi maladministrasi.

Pada kanal Twitter, capaian tertinggi pada bulan Februari dan Mei yang disebabkan konten quiz berhadiah. Growth subscribers di kanal Youtube memperoleh capaian tertinggi pada bulan Agustus yang disebabkan konten diskusi publik (live stream) dengan beberapa isu terkini yang diulas dan konten edukatif maladministrasi (video). Sedangkan pada kanal TikTok, capaian tertinggi terjadi pada bulan September yang disebabkan adanya konten yang mengulas isu terkini dan cukup dekat dengan audience.

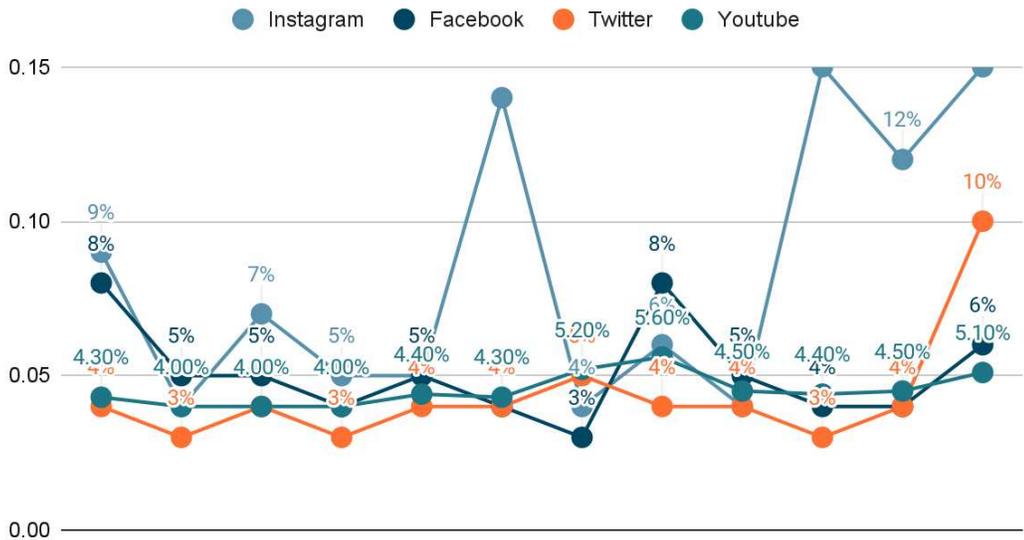
Total Growth 2023



### Total Impression 2023



### Engagement Rate 2023



### 3. Pengelolaan Halo Ombudsman

Tiket permintaan informasi/konsultasi merupakan jumlah tiket tertinggi pada tahun 2023. Permintaan informasi/konsultasi merupakan pelapor atau masyarakat yang memohon informasi terkait Ombudsman ataupun berkonsultasi mengenai masalah-masalah pelayanan publik yang dialami. Jumlah tiket permintaan konsultasi tahun 2023 adalah 595 pada kanal 137, 2.699 pada kanal whatsapp, 3.119 pada kanal live chat, 183 pada kanal free to

call, 167 pada kanal *click to call*, dan 81 pada kanal PSTN. Dari keenam kanal tersebut, jumlah tiket permintaan informasi paling tinggi terdapat pada kanal live chat bulan April 2023 sebanyak 618 tiket. Informasi yang paling banyak ditanyakan adalah mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan. Kanal Whatsapp dan live chat merupakan kanal yang paling diminati untuk menanyakan informasi atau konsultasi tentang Ombudsman dikarenakan merupakan kanal paling mudah dijangkau dan murah.

#### **4. PPID Ombudsman Meraih Predikat Informatif**

PPID Ombudsman RI meraih peringkat tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 yaitu predikat “Informatif” dengan nilai 94,37 dari Komisi Informasi Pusat. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2023.



*Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menerima piagam penghargaan Predikat Informatif dari Wakil Presiden RI Maruf Amin*

### 3.4.2. Kelompok Kerja/Layanan Data Informasi (Datin dan TI)

#### 1. Kebijakan Kelompok Pengelolaan Data dan Informasi

Kelompok Pengelolaan Data dan Informasi telah menyusun Draft Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Satu Data Ombudsman. Adapun Tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Satu Data Ombudsman ini adalah:

- a. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Ombudsman, antara Ombudsman dan Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
- b. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- c. Mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Draft Rancangan Peraturan Ombudsman tentang Satu Data Ombudsman telah ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 menjadi Peraturan Ombudsman Nomor 56 Tahun 2023 tentang Satu Data Ombudsman.

#### 2. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Berdasarkan amanat Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Evaluasi Kegiatan Statistik yang dilaksanakan oleh setiap instansi pusat dan daerah. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data indonesia dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Tujuan EPSS: (1) mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah; (2) meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Ombudsman Republik Indonesia telah mengikuti pelaksanaan penilaian EPSS pada Tahun 2023 dengan hasil penilaian yaitu **1,87 (Cukup)** seperti gambar dibawah ini:

**Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain**

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	1,75
Domain Kualitas Data	24%	2,60	1,70	1,46
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	2,47
Domain Kelembagaan	17%	2,60	1,85	1,88
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	2,00
<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>100%</b>	<b>2,60</b>	<b>1,78</b>	<b>1,87</b>

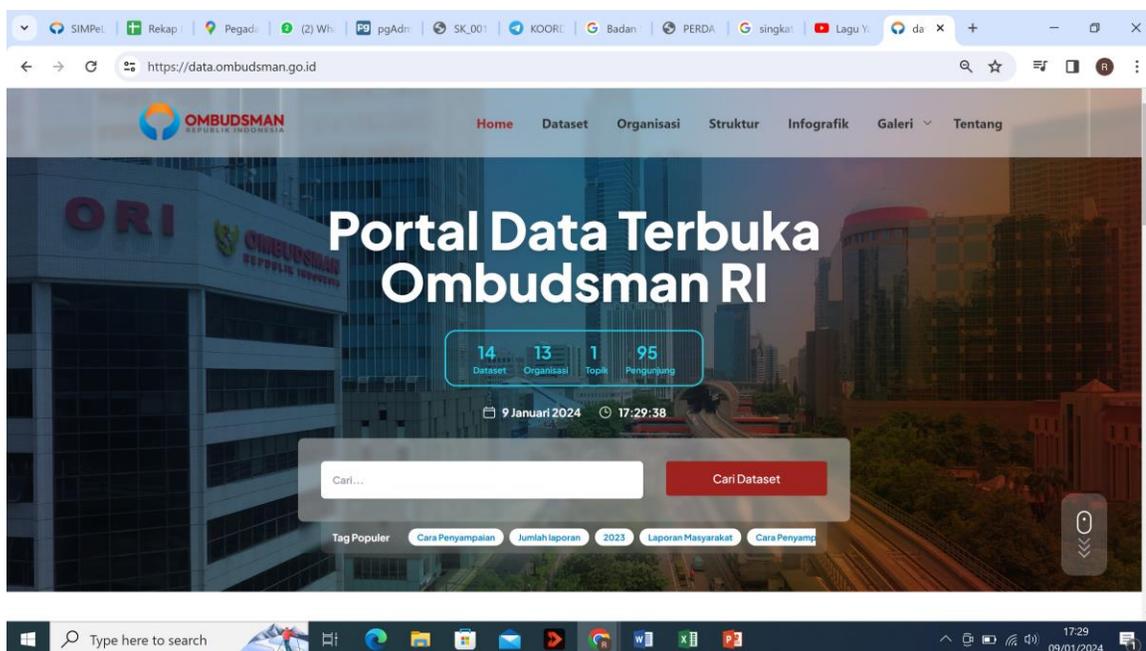
*Hasil Penilaian EPSS Ombudsman Republik Indonesia*

Berdasarkan hasil penilaian tersebut sesuai dengan Surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor : B-384.bt/01000/ES/11/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) terdapat catatan berupa Keunggulan, Kelemahan, dan Rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan Kegiatan Statistik Ombudsman untuk mencapai Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang lebih baik.

**3. Pengembangan Portal Satu Data Ombudsman**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Penyelenggaraan Kegiatan Satu Data terdiri atas: Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan perlu dilakukan Penyebarluasan Data dan Informasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 56 Tahun 2023 tentang Satu Data Ombudsman, Penyebarluasan Data merupakan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Dalam rangka melaksanakan hal tersebut maka Kelompok Pengelolaan Data dan Informasi telah melakukan pengembangan Portal Satu Data Ombudsman melalui url berikut: <https://data.ombudsman.go.id> . Berikut tampilan Portal Data Ombudsman saat ini:



#### 4. Pemberian Penghargaan Peringkat 3 dalam hal pemanfaatan JIP (Jaringan Intra Pemerintah)

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diselenggarakan oleh dalam rangka sinergi dan kolaborasi progresif antar Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Implementasi SPBE. Rakornas yang diselenggarakan oleh Kominfo di Hotel Mulia tanggal 16 – 19 Oktober 2023 tersebut membahas beberapa hal diantaranya adalah:

1. Pembangunan dan Penggunaan Pusat Data Nasional yang tidak sesuai standar
2. Satu Layanan Satu Aplikasi
3. Digital ID
4. Integrasi melalui SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)
5. Inovasi melalui Big Data Analytic dan Kecerdasan Buatan
6. Implementasi di Daerah terkait Program Smartcity dengan memanfaatkan Teknologi yang Disediakan Pemerintah

Dalam acara Rakornas tersebut, Kominfo sebagai penanggung jawab dalam implementasi SPBE Nasional, khususnya di bidang Infrastruktur dan Aplikasi SPBE juga memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga yang berprestasi dalam pemanfaatan aplikasi dan infrastruktur SPBE yaitu:

1. PDN (Pusat Data Nasional)

2. JIP (Jaringan Intra Pemerintah)
3. PSE (Pendaftaran Sistem Elektronik)
4. SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)
5. Aplikasi Berbagi Pakai yang disimpan di PDN seperti: Srikandi, SiCantik, dan Email Multi Domain

Ombudsman memperoleh peringkat 3 dalam pemanfaatan JIP dan diterima oleh Ibu Leni Milana selaku Plt. Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. Pemberian penghargaan oleh Bapak Samuel Abrijani *Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.*



1. Monitoring dan Perbaikan VPN Tahun 2023 telah dilakukan monitoring dan perbaikan jaringan VPN di 3 (tiga) kantor perwakilan, diantaranya: Sulawesi Tengah, Bali, dan Bengkulu.
2. Penguatan dan pembinaan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan dan keselamatan sistem komputer dan jaringan. Pada tahun 2023 dilakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan layanan pada Ombudsman CSIRT diantaranya:

- 1) Bimtek kesiapsiagaan teknis insiden keamanan siber pada CSIRT organisasi pemerintah pusat tahun 2023 di Bandung
  - 2) Rapat Pembinaan Keamanan Aplikasi Umum SPBE Tahun 2023 yang diadakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia
  - 3) Kegiatan Penilaian Cyber Security Maturity (CSM) Ombudsman Republik Indonesia
  - 4) Kegiatan Communication Check Gov-CSIRT
  - 5) Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis Keamanan Siber BSSN
3. Dalam Peningkatan Kapasitas SDM, Tim Teknologi Informasi Ombudsman mengikuti pelatihan teknis IPv6 dan DNS Advance yang diselenggarakan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dan IDNIC (Indonesia Network Information Centre) pada tanggal 5 - 8 Desember 2023 di Hotel Pullman Grand Central Bandung

#### 5. Perbaiki Data Klasifikasi Instansi Terlapor pada SIMPeL 4

Kegiatan "Perbaiki data klasifikasi instansi terlapor pada aplikasi SIMPeL 4" didasari pada masih banyaknya data "klasifikasi terlapor" yang NULL. Hal ini disebabkan oleh hasil migrasi data dari SIMPeL 1 ke SIMPeL 3. Pada awal penggunaan aplikasi SIMPeL 3, anomali pada data ini sudah disadari oleh tim admin aplikasi simple 3, tapi karena keterbatasan SDM, maka hal ini dibiarkan begitu saja. Ketika SIMPeL 4 sudah mulai digunakan dan SDM mencukupi, maka kegiatan ini mulai di inisiasi oleh tim admin SIMPeL 4 yang terdiri dari seluruh Pegawai di Layanan Data Informasi dan Teknologi Informasi. Berikut data "Terlapor" pada aplikasi SIMPeL 1.

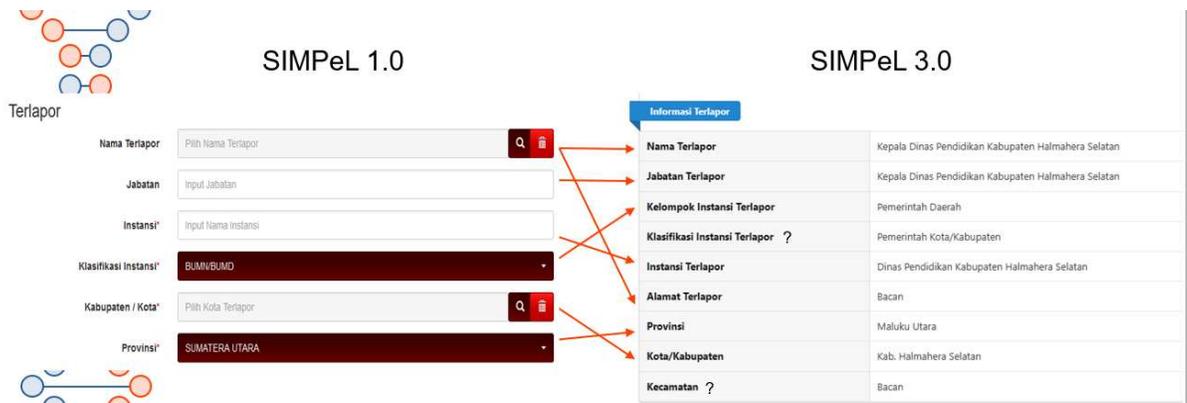
Terlapor

Nama Terlapor	<input type="text" value="Pilih Nama Terlapor"/>	 
Jabatan	<input type="text" value="Input Jabatan"/>	
Instansi*	<input type="text" value="Input Nama Instansi"/>	
Klasifikasi Instansi*	BUMN/BUMD 	
Kabupaten / Kota*	<input type="text" value="Pilih Kota Terlapor"/>	 
Provinsi*	SUMATERA UTARA 	

Berikut data "Terlapor" pada aplikasi SIMPeL 3

Informasi Terlapor	
<b>Nama Terlapor</b>	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
<b>Jabatan Terlapor</b>	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
<b>Kelompok Instansi Terlapor</b>	Pemerintah Daerah
<b>Klasifikasi Instansi Terlapor</b>	Pemerintah Kota/Kabupaten
<b>Instansi Terlapor</b>	Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
<b>Alamat Terlapor</b>	Bacan
<b>Provinsi</b>	Maluku Utara
<b>Kota/Kabupaten</b>	Kab. Halmahera Selatan
<b>Kecamatan</b>	Bacan

Sehingga Ketika data “Terlapor” dari SIMPeL 1 dan SIMPeL 3 disandingkan, maka hasilnya akan seperti ini:



Sehingga demikian ada kekosongan data untuk “Klasifikasi Instansi terlapor”.

Hasil inventarisir data yang harus diperbaiki pada minggu ke 4 bulan Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Kelompok Instansi	Nama Kelompok Instansi	Jumlah Data
1	Kejaksaan	1856
2	Lembaga Peradilan	2966
3	Komisi Negara/Lembaga Negara Non Struktural	966
4	BUMN/BUMD	4378
5	Perguruan Tinggi Negeri	628
6	Dewan Perwakilan Rakyat	149
7	Tentara Nasional Indonesia	321
8	Perbankan	1253
9	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	718
10	Pemerintah Daerah	24173
11	Badan Pertanahan Nasional	4821
12	Kepolisian	8401
13	Instansi Pemerintah / Kementerian	6048
14	Badan Pemeriksa Keuangan	3
15	Badan Swasta/Perorangan	193
16	Perorangan	60
17	Lain-lain	2245
18	Lembaga Pendidikan Negeri	1633
19	Rumah Sakit Pemerintah	570
20	Lembaga Pendidikan Swasta	63
21	Rumah Sakit Swasta	9
22	Perguruan Tinggi Swasta	14
	Total	61468

Daftar jumlah data berdasarkan “Kelompok Instansi Terlapor

Berdasarkan table diatas, total data yang perlu diperbaiki sebanyak **61.468** data tersebar di 22 (dua puluh dua) kelompok instansi. Data tersebut hanya berupa data LM, RCO dan IN. tidak termasuk KNL dan Tembusan. Hal ini karena perbaikan data jenis LM, RCO, dan IN lebih prioritas di bandingkan dengan KNL dan Tembusan.

Setelah diadakan meeting internal bersama Kepala Biro, maka ditetapkan target perbaikan data pada tahun 2023 sebesar **60%** dari jumlah total yang ada atau sebesar **36.680 data** saja. Sementara sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2024.

Contoh perbaikan data yang dilakukan:

Laporan Kinerja Biro HMTI Tahun 2023

id [PK] character varying	nama_terlapor character varying	jabatan_terlapor character varying	kelompok_instansi_terlapor character varying	klasifikasi_instansi_terlapor character varying	nama_instansi_terlapor character varying	perihal text	no_arsip character varying
1	12f99c15...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Tidak mendapat Raskin, BLSM, dan bantuan lainnya dari pemerintah untuk orang miskin padahal menurut...	0024/LM/VII/2013/BTM
2	133844c2...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Adanya pemberitaan media massa Batam Pos tanggal 08 Januari 2016 mengenai penyaluran Dana Aloka...	0019/IN/I/2016/BTM
3	164964e9...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Pembiaran Pembangunan Kios Liar yang dilakukan oknum masyarakat yang menggunakan Daerah Milik J...	0042/IN/IV/2015/BTM
4	1ca2ba1c...	Pemerintah Propinsi	Kepala	kelompok_instansi_10	[null]	Dugaan penundaan berlarut oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam terkait belum adanya p...	0020/LM/IV/2020/BTM
5	1cc1faca...	Pemerintah Propinsi	Kepala Dinas	kelompok_instansi_10	[null]	Dugaan penundaan berlarut oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam terkait belum adanya p...	0020/LM/IV/2020/BTM
6	168505b...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	kepala dinas	kelompok_instansi_10	[null]	Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau menunda DP3 Sdr. Nelson Bur, sehingga terkendala data...	0061/LM/XI/2016/BTM
7	1e0f3b85...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	sudah mendapatkan izin titik untuk mendirikan reklame tapi tidak dapat mendirikan reklame oleh Dinas P...	0127/LM/XI/2016/BTM
8	1ef18605...	Kelurahan	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Dugaan Penundaan Berlarut terkait pengurusan Akta Kelahiran dan KK yang diajukan oleh Pelapor di Kant...	0118/LM/XI/2019/BTM
9	1ff24529...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Dugaan Permintaan Uang yang dilakukan oleh oknum petugas kelurahan Sei Lakam Timur kepada masya...	0115/IN/IX/2016/BTM
10	2042213...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Dugaan tidak memberikan pelayanan terkait tidak dilakukan perbaikan jalan bergelombang di Jl. Laksam...	0022/IN/III/2018/BTM
11	20c04671...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Keterlambatan dalam pembuatan seragam batik bagi para siswa kelas VIII di SMPN 1 Daik Lingga akibat ...	0076/IN/III/2014/BTM
12	20c524b0...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Pelanggaran Mobil Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bintan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset ...	0063/IN/VI/2015/BTM
13	21a81426...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Selanjutnya mantan karyawan PT Adhli Sukses Pratama yang telah di-PHK sepihak oleh Manajemen Perusa...	0119/IN/IV/2014/BTM
14	21c3d30f...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	Pegawai Peng...	kelompok_instansi_10	[null]	Pelapor adalah 14 (empat belas) eks karyawan yang di-PHK oleh PT. Panca Rasa Pratama dan mengajuk...	0086/IN/VIII/2014/BTM
15	21d303d8...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	Kepala BKD	kelompok_instansi_10	[null]	Dugaan Maladministrasi penundaan berlarut terkait tindak lanjut penanganan pengaduan ketenagakerja...	0036/LM/IV/2018/BTM
16	24a8754b...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	Kepala Badan	kelompok_instansi_10	[null]	adanya dugaan maladministrasi dalam seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Lingga tahun 2014 berupa ti...	0004/LM/VI/2015/BTM
17	25f14264...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Dugaan penyimpangan prosedur oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man...	0135/LM/XI/2019/BTM
18	26f8b6c1...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	adanya pemberitaan media massa Haluan Kepri tentang warga Desa Pulau Pemping Kecamatan Belakha...	0069/IN/VI/2016/BTM
19	273e902d...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Kelalaian RSUP Kepulauan Riau terhadap pasien	0022/IN/II/2014/BTM
20	279902d...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Pemda dan Pertamina belum menyediakan depot BBM Non Subsidi(Pertamax) di Daik Lingga sehingga ...	0031/LM/VII/2013/BTM
21	28a8e7a8...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	kepala dinas p...	kelompok_instansi_10	[null]	adanya dugaan penundaan berlarut penerbitan surat kematian yang dilakukan oleh lurah kelurahan Kasu K...	0138/LM/XII/2016/BTM
22	28b4018...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	Panselda CPN...	kelompok_instansi_10	[null]	Oknum pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga diduga melakukan penyalah...	0118/IN/X/2016/BTM
23	28b4018...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	Panselda CPN...	kelompok_instansi_10	[null]	adanya dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh pihak dinas Pendidikan Kota Batam yang m...	0124/LM/XI/2016/BTM
24	2a1430e5...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Dugaan maladministrasi dalam penerimaan CPNS Kota Tanjungpinang	0005/LM/I/2015/BTM
24	2a1430e5...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Dugaan Maladministrasi tidak memberikan pelayanan terkait tidak memberikan nama jalan di simpang S...	0134/IN/X/2017/BTM

Data sebelum diperbaiki

id [PK] character varying	nama_terlapor character varying	jabatan_terlapor character varying	kelompok_instansi_terlapor character varying	klasifikasi_instansi_terlapor character varying	nama_instansi_terlapor character varying	perihal text	no_arsip character varying
1	12f99c15...	Pemerintah Kota Batam	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Tidak mendapat Raskin, BLSM, dan bantuan lainnya dari pemerintah untuk orang miskin padahal menurut...	0024/LM/VII/2013/BTM
2	133844c2...	Pemerintah Kabupaten Bintan	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Adanya pemberitaan media massa Batam Pos tanggal 08 Januari 2016 mengenai penyaluran Dana Aloka...	0019/IN/I/2016/BTM
3	164964e9...	Pemerintah Kota Batam	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Pembiaran Pembangunan Kios Liar yang dilakukan oknum masyarakat yang menggunakan Daerah Milik J...	0042/IN/IV/2015/BTM
4	1ca2ba1c...	UPTD Pengawasan Ketenagakerja...	Kepala	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Dugaan penundaan berlarut oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam terkait belum adanya p...	0020/LM/IV/2020/BTM
5	1cc1faca...	Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan...	Kepala Dinas	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_97	Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau menunda DP3 Sdr. Nelson Bur, sehingga terkendala data...	0061/LM/XI/2016/BTM
6	168505b...	Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam	kepala dinas	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	sudah mendapatkan izin titik untuk mendirikan reklame tapi tidak dapat mendirikan reklame oleh Dinas P...	0127/LM/XI/2016/BTM
7	1e0f3b85...	Dinas Kependudukan dan Pencatat...	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Dugaan Penundaan Berlarut terkait pengurusan Akta Kelahiran dan KK yang diajukan oleh Pelapor di Kant...	0118/LM/XI/2019/BTM
8	1ef18605...	Kelurahan Sei Lakam Timur	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_24	Dugaan Permintaan Uang yang dilakukan oleh oknum petugas kelurahan Sei Lakam Timur kepada masya...	0115/IN/IX/2016/BTM
9	1ff24529...	Pemerintah Kota Batam	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Dugaan tidak memberikan pelayanan terkait tidak dilakukan perbaikan jalan bergelombang di Jl. Laksam...	0022/IN/III/2018/BTM
10	2042213...	Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Keterlambatan dalam pembuatan seragam batik bagi para siswa kelas VIII di SMPN 1 Daik Lingga akibat ...	0076/IN/III/2014/BTM
11	20c04671...	Dinas Pengelolaan Keuangan dan ...	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Pelanggaran Mobil Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bintan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset ...	0063/IN/VI/2015/BTM
12	20c524b0...	Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Selanjutnya mantan karyawan PT Adhli Sukses Pratama yang telah di-PHK sepihak oleh Manajemen Perusa...	0119/IN/IV/2014/BTM
13	21a81426...	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kot...	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Pelapor adalah 14 (empat belas) eks karyawan yang di-PHK oleh PT. Panca Rasa Pratama dan mengajuk...	0086/IN/VIII/2014/BTM
14	21c3d30f...	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr...	Pegawai Peng...	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Dugaan Maladministrasi penundaan berlarut terkait tindak lanjut penanganan pengaduan ketenagakerja...	0036/LM/IV/2018/BTM
15	234f1ead...	BKD Kabupaten Lingga	Kepala BKD	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	adanya dugaan maladministrasi dalam seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Lingga tahun 2014 berupa ti...	0004/LM/VI/2015/BTM
16	24a8754b...	Badan Kepegawaian dan Pengemb...	Kepala Badan	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Dugaan penyimpangan prosedur oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man...	0135/LM/XI/2019/BTM
17	25f14264...	Badan Pengendalian Dampak Ling...	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	adanya pemberitaan media massa Haluan Kepri tentang warga Desa Pulau Pemping Kecamatan Belakha...	0069/IN/VI/2016/BTM
18	26f8b6c1...	RSUD Raja Ahmad Tabib Propinsi ...	[null]	kelompok_instansi_19	klasifikasi_instansi_100	Kelalaian RSUP Kepulauan Riau terhadap pasien	0022/IN/II/2014/BTM
19	273e902d...	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	[null]	kelompok_instansi_10	[null]	Pemerintah Kabupaten/Kotamadya	
20	279902d...	Kelurahan Kasu	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_24	Pemda dan Pertamina belum menyediakan depot BBM Non Subsidi(Pertamax) di Daik Lingga sehingga ...	0031/LM/VII/2013/BTM
21	28a8e7a8...	Dinas Pendidikan Pemuda dan Ota...	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	adanya dugaan penundaan berlarut penerbitan surat kematian yang dilakukan oleh lurah kelurahan Kasu K...	0138/LM/XII/2016/BTM
22	28b4018...	Dinas Pendidikan Kota Batam	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Oknum pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga diduga melakukan penyalah...	0118/IN/X/2016/BTM
23	28b4018...	Pemerintah Kota Tanjungpinang	kepala dinas p...	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	adanya dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh pihak dinas Pendidikan Kota Batam yang m...	0124/LM/XI/2016/BTM
24	28b4018...	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Panselda CPN...	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Dugaan maladministrasi dalam penerimaan CPNS Kota Tanjungpinang	0005/LM/I/2015/BTM
24	2a1430e5...	Pemerintah Kota Tanjungpinang	[null]	kelompok_instansi_10	klasifikasi_instansi_22	Dugaan Maladministrasi tidak memberikan pelayanan terkait tidak memberikan nama jalan di simpang S...	0134/IN/X/2017/BTM

Data sesudah diperbaiki

Kegiatan ini dimulai pada tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Dalam rentang waktu tersebut, tim sudah melakukan peraian data sebesar **91.72 %** atau sebesar **56.377 data**. Sisa data yang masih harus diperbaiki adalah sebesar **5.091 data** atau sebesar **8.28%** (akan dituntaskan pada tahun 2024).

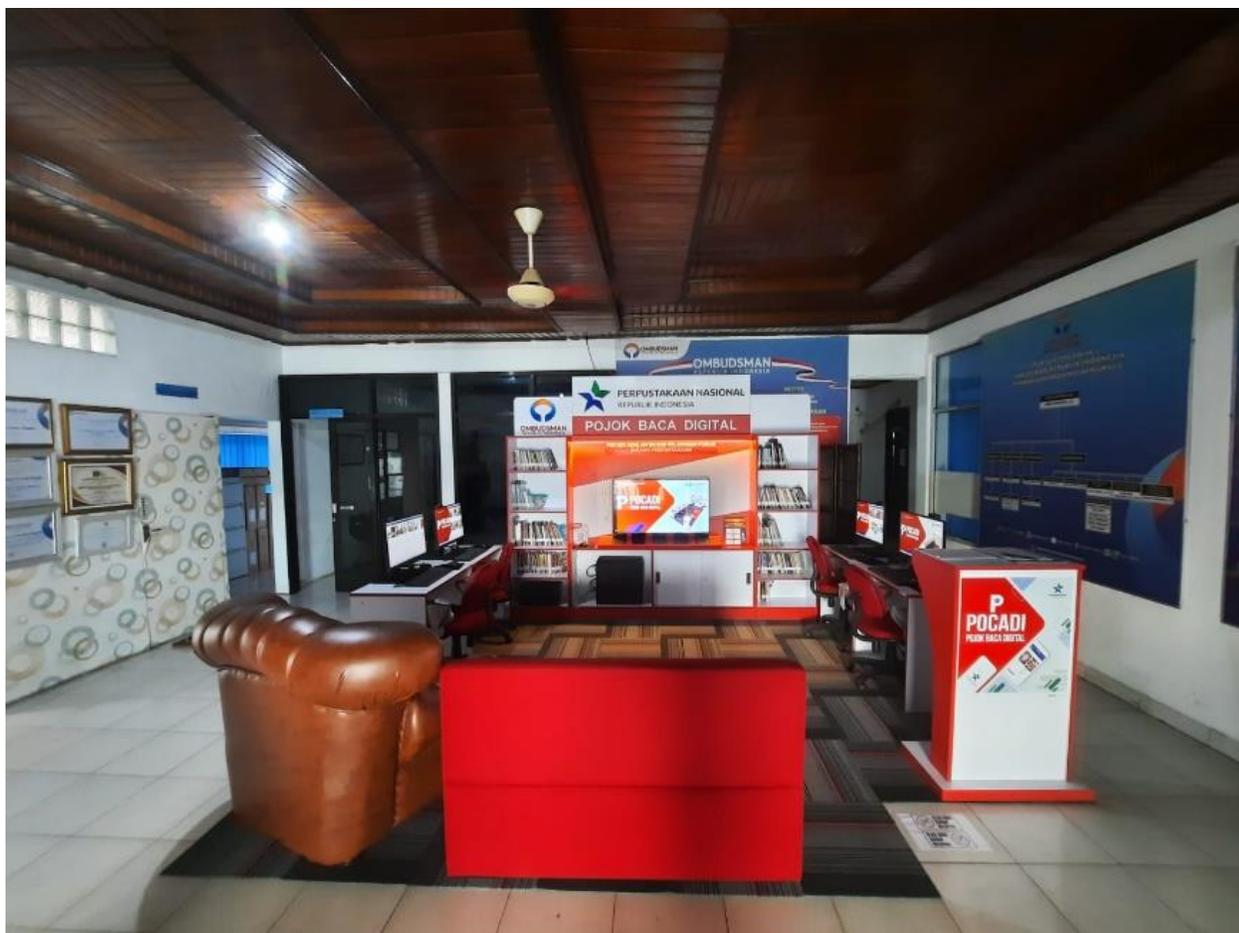
Kelompok Instansi	Nama Kelompok Instansi	Jumlah Data	Diperbaiki	Sisa	Status	Mulai Tanggal	Selesai Tanggal
1	Kejaksaan	1856	1856	0	Done	1 Maret 2023	1 Maret 2023
2	Lembaga Peradilan	2966	2966	0	Done	2 Maret 2023	3 Maret 2023
3	Komisi Negara/Lembaga Negara Non Struktural	966	966	0	Done	3 Maret 2023	15 Maret 2023
4	BUMN/BUMD	4378	4378	0	Done	16 Maret 2023	17 April 2023
5	Perguruan Tinggi Negeri	628	628	0	Done (dilebur ke kelompok "Lembaga Pendidikan Negeri")	18 April 2023	2 Mei 2023
6	Dewan Perwakilan Rakyat	149	149	0	Done	2 Mei 2023	2 Mei 2023
7	Tentara Nasional Indonesia	321	321	0	Done	3 Mei 2023	4 Mei 2023
8	Perbankan	1253	1253	0	Done	5 Mei 2023	15 Mei 2023
9	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	718	718	0	Done	16 Mei 2023	18 Mei 2023
10	Pemerintah Daerah	24173	19082	5091	On Process	30 Agustus 2023	
11	Badan Pertanahan Nasional	4821	4821	0	Done	31 Mei 2023	4 Juli 2023
12	Kepolisian	8401	8401	0	Done	4 Juli 2023	18 Oktober 2023
13	Instansi Pemerintah / Kementerian	6048	6048	0	Done	18 Juli 2023	22 September 2023
14	Badan Pemeriksa Keuangan	3	3	0	Done	19 Mei 2023	19 Mei 2023
15	Badan Swasta/Perorangan	193	193	0	Done	18 Mei 2023	18 Mei 2023
16	Perorangan	60	60	0	Done (dilebur ke kelompok "Badan Swasta/Perorangan")	19 Mei 2023	19 Mei 2023
17	Lain-lain	2245	2245	0	Done	27 Mei 2023	23 Juni 2023
18	Lembaga Pendidikan Negeri	1633	1633	0	Done	22 Mei 2023	30 Mei 2023
19	Rumah Sakit Pemerintah	570	570	0	Done	20 Mei 2023	22 Mei 2023
20	Lembaga Pendidikan Swasta	63	63	0	Done	19 Mei 2023	19 Mei 2023
21	Rumah Sakit Swasta	9	9	0	Done	19 Mei 2023	19 Mei 2023
22	Perguruan Tinggi Swasta	14	14	0	Done (dilebur ke kelompok "Lembaga Pendidikan Swasta")	19 Mei 2023	19 Mei 2023
	Total	61468					
	Total diperbaiki		56377		91.72	%	
	Sisa data			5091	8.28	%	

Hasil perbaikan data per tanggal 31 Desember 2023

### 3.4.3. Kelompok Kerja/Layanan Kepustakaan

#### 1. Pengembangan Literasi Antimaladministrasi

Sebagai bentuk implementasi dari kerja sama antara Ombudsman RI dengan Perpustakaan Nasional RI, Ombudsman RI mendapatkan bantuan berupa Pojok Baca Digital (POCADI). Atas inisiasi Perpustakaan Ombudsman juga dengan inisiatif dari Kantor Perwakilan, dengan melihat kesiapan ruang dan SDM, bantuan POCADI tahun 2023 diberikan untuk Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Layanan POCADI ini terdiri 350 judul buku / 700 eksemplar, 4 buah komputer meja, 1 smart TV, 5 buah tablet Android. Dengan adanya layanan POCADI ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan literasi bagi Insan Ombudsman di kantor Perwakilan Bengkulu serta masyarakat umum yang datang ke Kantor Perwakilan Bengkulu.



*POCADI di Kantor Perwakilan Bengkulu*

Pada tahun 2023, Perpustakaan Ombudsman juga telah membangun Pojok Baca Ombudsman (PBO) di Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan.



*PBO di Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara*



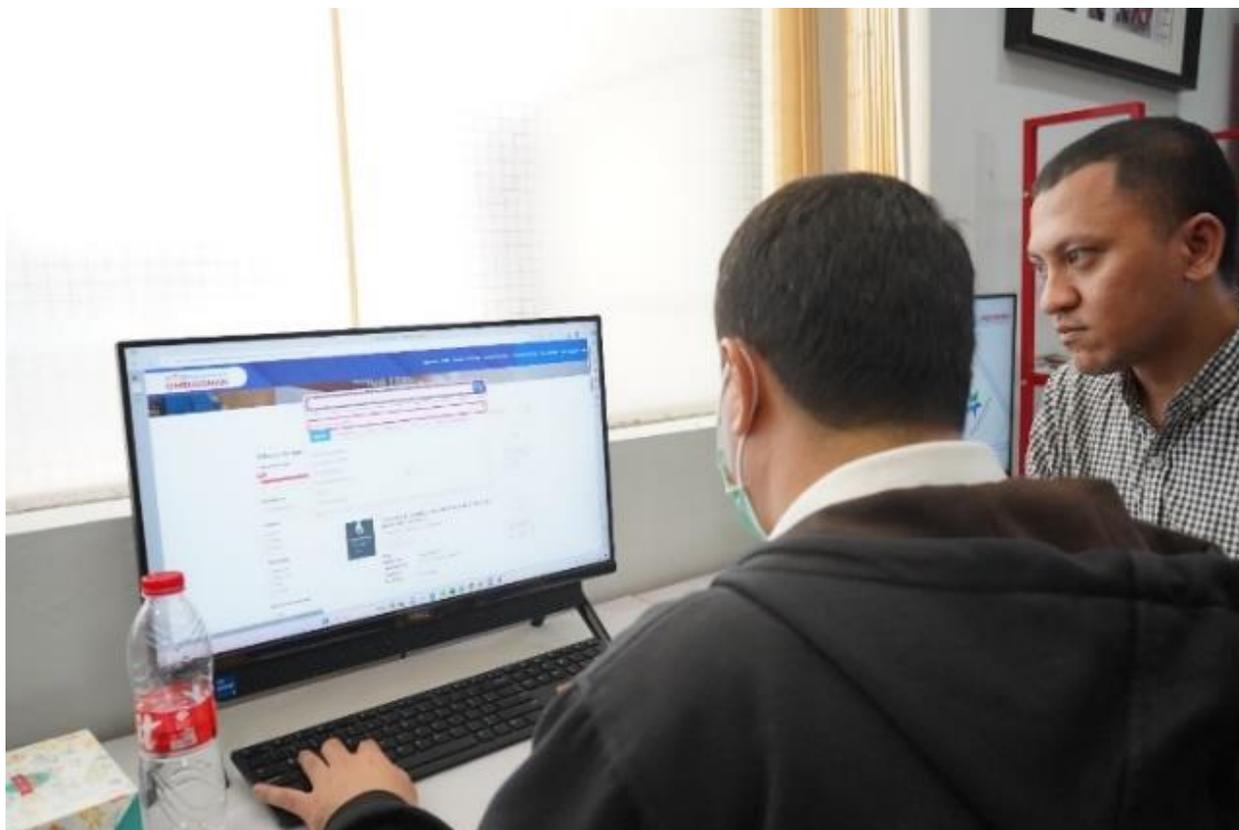
*PBO di Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan*

PBO ini telah dilengkapi dengan koleksi buku 130 eksemplar siap layan dan 1 buah komputer, dan meja dan kursi untuk pengunjung. Diharapkan PBO tersebut dapat meningkatkan minat baca serta literasi anti maladministrasi baik

bagi Insan Ombudsman maupun bagi masyarakat umum yang berkunjung ke Kantor Perwakilan terkait.

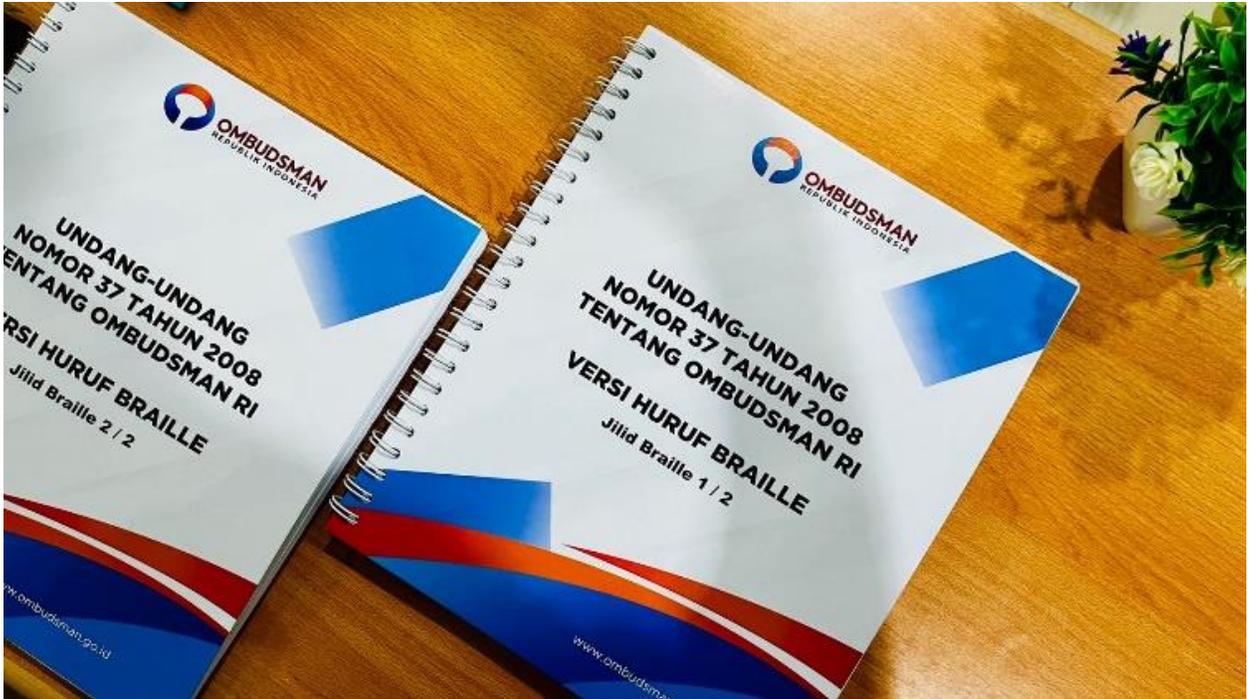
## **2. Layanan Informasi Ramah Disabilitas**

Tidak hanya pengembangan layanan di Kantor Perwakilan, namun Perpustakaan Ombudsman juga melakukan pengembangan agar layanan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja termasuk penyandang disabilitas. Untuk itu Perpustakaan Ombudsman menyediakan komputer layanan yang dilengkapi dengan *Non Visual Desktop Access* (NVDA) yaitu perangkat lunak pembaca layar yang dapat membantu pada disabilitas netra untuk memanfaatkan komputer tersebut.



*Instalasi, setting dan demo penggunaan Komputer Ramah Disabilitas kepada staf perpustakaan*

Tidak hanya itu, Perpustakaan Ombudsman RI berkolaborasi dengan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Ombudsman melakukan pengadaan koleksi braille Undang-Undang 38 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



*Koleksi Braille Perpustakaan Ombudsman*

Laporan Triwulan I, II, III, IV 2023, Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan (2022).



Gambar Laporan Triwulan I Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi 2023



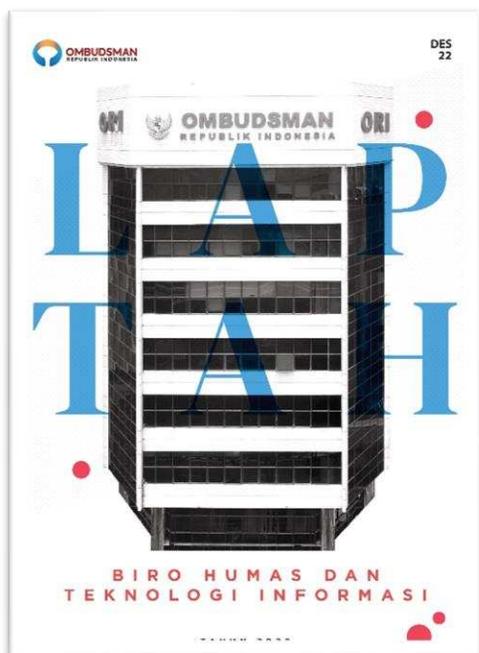
Gambar Laporan Triwulan II Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi 2023



Gambar Laporan Triwulan III Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi 2023



Gambar Laporan Triwulan IV Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi 2023

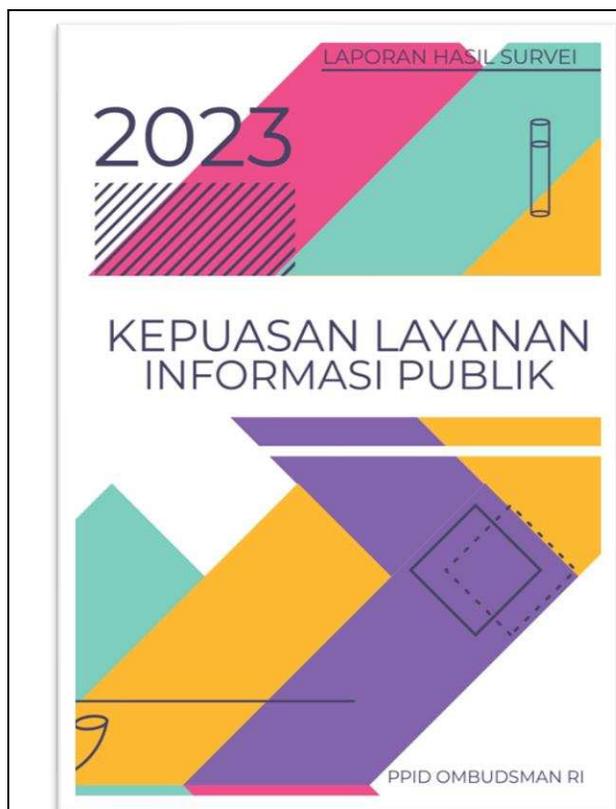


Gambar Laporan Tahunan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi 2022

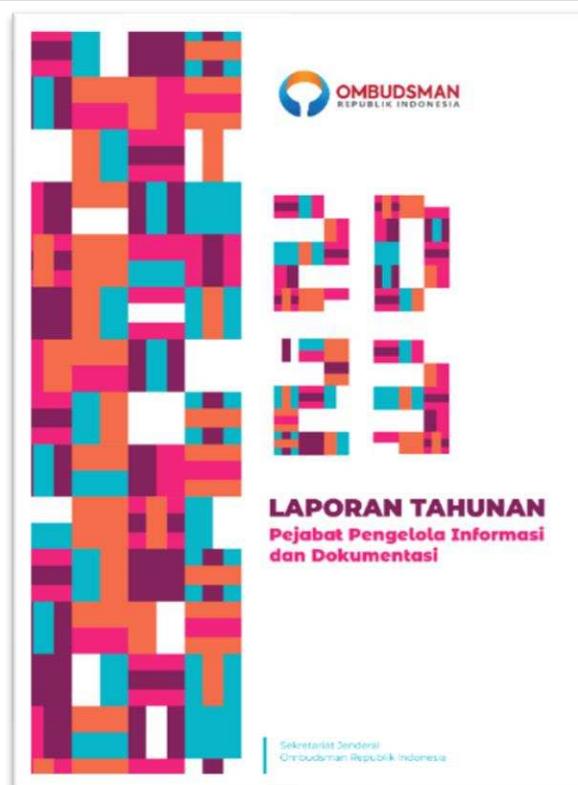


Gambar Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi 2022

## Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik 2022 dan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik 2022



Gambar Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik 2023



Gambar Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik (PPID) 2023

## PENGHARGAAN

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada tahun 2023 mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya:

1. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2023 Predikat **“SANGAT BAIK” (3,75)**



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **13** TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA  
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

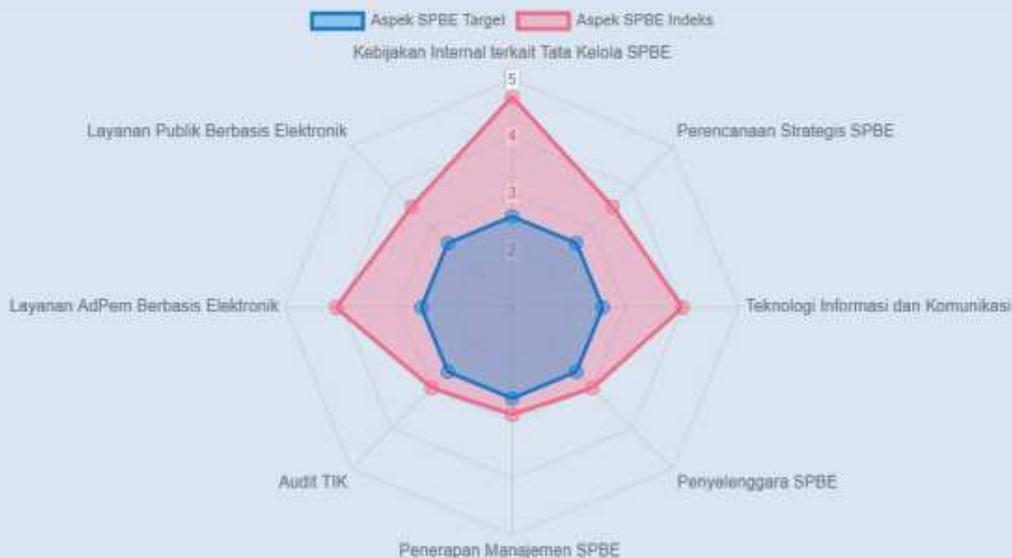
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.  
**Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)**

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Dewan Ketahanan Nasional	3,05	Baik
2	Komisi Pemilihan Umum	3,62	Sangat Baik
3	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2,82	Baik
4	Komisi Pemberantasan Korupsi	4,10	Sangat Baik
5	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	4,24	Memuaskan
<b>6</b>	<b>Ombudsman Republik Indonesia</b>	<b>3,75</b>	<b>Sangat Baik</b>

**INDEKS SPBE – OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**3,75**  
(Sangat Baik)

**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**



<b>Nama Indeks</b>	<b>Nilai 2023</b>
<b>SPBE</b>	<b>3,75</b>
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	4,70
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,70
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	3,60
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	4,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	2,91
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,88
<i>Audit TIK</i>	3,00
<b>Domain Layanan SPBE</b>	3,86
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,10
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,50

2. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2023 Predikat  
"Informatif" (94,37)



KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 17/KEP/KIP/XII/2023

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 17 /KEP/KIP/XII/2023  
TENTANG  
HASIL MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2023

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2023**

**1. Informatif**

<b>LEMBAGA NON STRUKTURAL</b>		
<b>NO</b>	<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>
1	Komisi Pemilihan Umum	98,37
2	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	96,25
3	Ombudsman Republik Indonesia	94,37

3. Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori **A (Memuaskan)** Nilai **86,40**



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 374 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENETAPAN NILAI HASIL PENGAWASAN

KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2023

DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

**C. KATEGORI SEKRETARIAT JENDERAL**

<b>PERINGKAT</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>	<b>PREDIKAT</b>	<b>HASIL AKHIR</b>
1	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM	AA	93,24
2	BIRO ADMINISTRASI PENGAWASAN PENYELENGGAR AAN PELAYANAN PUBLIK	AA	92,98
3	INSPEKTORAT	A	88,38
4	BIRO HUKUM KERJASAMA DAN ORGANISASI	A	88,02
5	BIRO HUMAS TEKNOLOGI INFORMASI	A	86,40
6	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	BB	78,56

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman Republik Indonesia atas pelaksanaan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum memenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja, dan dapat memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian capaian indikator, menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang ditetapkan masuk kategori berhasil memenuhi target

Sasaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah “Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas” dengan target nilai 2,93 (skala 4), direalisasikan senilai 3,60 dengan persentase sebesar 123%. Realisasi Perjanjian Kinerja atas nilai aspek implementasi dengan bobot 33,3% terhadap Capaian Rincian Output, Nilai Efisiensi Unit Kerja, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, dan Penyerapan Anggaran mendapatkan nilai 99,47%. Selain itu nilai aspek manfaat dengan bobot 66,7% terhadap variable indikator mendapatkan hasil nilai 85,23%.

Total penyerapan dari pagu Rp 2.955.107.000 direalisasikan Rp 2.941.196.639 (99,53%), dengan tercapainya semua target di tahun 2023 terdapat efisiensi sebesar Rp 13.910.361. Dokumen hasil kinerja capaian output selama tahun 2023: Nilai keterbukaan informasi publik, Indeks SPBE, Indeks kepuasan pengguna layanan Biro, Nilai SAKIP, Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku, Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai, Nilai pengelolaan arsip, Rasio pegawai yang meningkatkan kinerjanya melalui *coaching/mentoring/counseling* (CMC), dan Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah menyusun 6 dokumen Laporan Kinerja 2022, Laporan Triwulan I, II, III, dan IV 2023, Laporan Tahunan 2022 sesuai target perjanjian kinerja.

## LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Biro, Rencana Kerja, dan Realisasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2023

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wanton Sidauruk  
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO  
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN  
TEKNOLOGI INFORMASI,

Suganda Pandapotan Pasaribu  
NIP. 197309161993111001

  
Wanton Sidauruk  
NIP. 196610061995031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi - Aspek Implementasi (33,3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	2,93
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6

KRO/RO	Anggaran
<b>KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>Rp. 2.475.107.000,00</b>
RO1 : Layanan Hubungan Masyarakat	Rp. 765.257.000,00
RO2 : Layanan Umum	Rp. 213.757.000,00
RO3 : Layanan Data dan Informasi	Rp. 1.496.093.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.475.107.000,00</b>

Jakarta,

Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO  
 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN  
 TEKNOLOGI INFORMASI,

  
 Suganda Pandapotan Pasaribu  
 NIP. 197309161993111001

  
 Wanton Sidauruk  
 NIP. 196610061995031001



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	2,93	0,5	1,2	1,7	2,93
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6	3	1	1	1

Jakarta, Januari 2023  
 KEPALA BIRO  
 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN  
 TEKNOLOGI INFORMASI,

Wanton Sidauruk  
 NIP. 196610061995031001



**DEFINISI OPERASIONAL PERHITUNGAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Definisi Operasional/Formula	Sumber Data
1	Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	2,93	<p><b>Definisi Operasional:</b> Diukur berdasarkan nilai kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b></p> $IK = (NKI \times W_{NKI}) + (NKM \times W_{NKM})$ <p><math>W_{NKI} = 1,33</math> (33,3% dari indeks 4); <math>W_{NKM} = 2,67</math> (66,7% dari indeks 4)</p> <p>Keterangan: IK : indeks kinerja NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi NKM : nilai kinerja atas aspek manfaat <math>W_{NKI}</math> : bobot nilai kinerja atas aspek implementasi <math>W_{NKM}</math> : bobot nilai kinerja atas aspek manfaat</p>	Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

				<p><b>Perhitungan aspek implementasi:</b></p> $NKI = (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E) + (K \times W_K) + (P \times W_P)$ <p><math>W_{CRO} = 43,5\%</math>; <math>W_E = 28,6\%</math>; <math>W_K = 18,2\%</math>; <math>W_P = 9,7\%</math></p> <p>Keterangan: NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi CRO : capaian Rincian Output <math>W_{CRO}</math> : bobot capaian Rincian Output NE : nilai efisiensi unit kerja <math>W_E</math> : bobot nilai efisiensi unit kerja K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan <math>W_K</math> : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan P : penyerapan anggaran <math>W_P</math> : bobot penyerapan anggaran</p> <p>1. Capaian Rincian Output (CRO)</p> $CRO = \left( \sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{n}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian Rincian Output yang diperhitungkan adalah 1-100%</li> </ul> <p>Keterangan: CRO : capaian RO RVRO<sub>i</sub> : realisasi volume RO i TVRO<sub>i</sub> : target volume RO i n : jumlah RO</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>2. Nilai efisiensi unit kerja (NE)</p> $NE = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ $E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian Realisasi Rincian Output yang diperhitungkan adalah 1-120%</li> <li>• Nilai efisiensi Rincian Output tertinggi 20% dan terendah -20%</li> </ul> <p>Keterangan:  <math>E_{RO}</math> : efisiensi Rincian Output  <math>AARO_i</math> : alokasi anggaran RO i  <math>RARO_i</math> : realisasi anggaran RO i  <math>CRO_i</math> : capaian RO i  <math>n</math> : jumlah RO</p> <p>3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (K)</p> $K = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{RPDK_n -  RPDK_n - RAK_n }{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$ <p>Keterangan:  <math>K</math> : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan  <math>RAK_n</math> : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n  <math>RPDK_n</math> : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n  <math>n</math> : jumlah bulan</p>	
			<p>4. Penyerapan anggaran (P)</p> $P = \left(\frac{RA}{AA}\right) \times 100\%$ <p>Keterangan:  <math>P</math> : penyerapan anggaran  <math>RA</math> : realisasi anggaran  <math>AA</math> : alokasi anggaran</p> <p><b>Perhitungan aspek manfaat:</b></p> $NKM = \left( \sum_{i=1}^n \frac{RMK_i}{NMK_i} \times W_{imk_i} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:  <math>NKM</math> : nilai kinerja atas aspek manfaat  <math>RMK_i</math> : realisasi indikator manfaat kegiatan  <math>NMK_i</math> : nilai maksimal indikator manfaat kegiatan  <math>W_{imk_i}</math> : bobot target indikator manfaat kegiatan  <math>n</math> : jumlah indikator manfaat kegiatan</p>	
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6	<p>Merupakan Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan yang disusun terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Triwulan I (tahun n)</li> <li>2. Laporan Triwulan II (tahun n)</li> <li>3. Laporan Triwulan III (tahun n)</li> <li>4. Laporan Triwulan IV (tahun n-1)</li> <li>5. Laporan Tahunan (tahun n-1)</li> <li>6. Laporan Kinerja (tahun n-1)</li> </ol>	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

**Daftar Variabel Target Rincian Output Indikator Aspek Implementasi**

KODE	URAIAN	TARGET	
		Volume	Satuan
4192.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	212	Laporan
4192.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan
4192.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan

**Daftar Variabel Indikator Aspek Manfaat**

No	Indikator Aspek Manfaat	Bobot	Proyeksi 2023	Keterangan	Sumber Data
1	Nilai keterbukaan informasi publik	20%	88	Berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)	Hasil penilaian Keterbukaan Informasi KIP
2	Indeks SPBE	20%	2,75 (Skala 5)	Berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi SPBE ( <i>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</i> ) oleh Kemenpan RB	Hasil penilaian SPBE Kemenpan RB
3	Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Humas dan TI	15%	3 (skala 4)	Diukur berdasarkan hasil pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan Biro Humas dan TI	Biro Humas TI
4	Nilai SAKIP Biro Humas TI	10%	75	Berdasarkan hasil penilaian mandiri SAKIP	Hasil Tim Penilai Internal
5	Nilai RB Biro Humas TI	10%	82,5	Berdasarkan hasil PMPRB	Hasil Tim Penilai Internal
6	Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Biro Humas TI	5%	B	Diukur berdasarkan jumlah pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang terjadi dalam unit kerja. 0 = A 1 = B 2 - 3 = C 4 - 5 = D >5 = E	Inspektorat

7	Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Biro Humas TI	5%	100%	Berdasarkan persentase jumlah Tindak Lanjut yang dalam kontrol langsung Biro Humas TI atas Rekomendasi yang telah sesuai (status 1) dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (status 4) dibagi jumlah rekomendasi	BPK/Inspektorat
8	Nilai pengelolaan arsip Biro Humas TI	5%	75,26 (Skala 100)	Diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri dan hasil verifikasi dari tim ANRI atas kualitas pengelolaan arsip Biro Humas TI	Tim Pengawasan Kearsipan Internal
9	Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui <i>coaching/mentoring/counseling</i> (CMC)	5%	75%	Diukur berdasarkan jumlah pegawai di unit kerja yang mengalami peningkatan kinerja melalui <i>coaching/mentoring/counseling</i> dibandingkan jumlah seluruh pegawai di unit kerja tersebut	Biro Humas TI
10	Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu	5%	100%	Diukur berdasarkan jumlah aduan dan saran yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja dibandingkan dengan jumlah seluruh temuan aduan dan saran dari Penjaminan Mutu	KU MM



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**TAHUN 2023**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi - Aspek Implementasi (33,3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	2,93

Jakarta, Januari 2023  
KEPALA BIRO  
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN  
TEKNOLOGI INFORMASI,

Wanton Sidauruk  
NIP. 196610061995031001



OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEKANISME PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA  
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
TAHUN 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Definisi Operasional/Formula	Sumber Data
1	Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	2,93	<p><b>Definisi Operasional:</b> Diukur berdasarkan nilai kinerja atas aspek implementasi dan aspek manfaat.</p> <p><b>Formula perhitungan:</b></p> $IK = (NKI \times W_{NKI}) + (NKM \times W_{NKM})$ <p><math>W_{NKI} = 1,33</math> (33,3% dari indeks 4); <math>W_{NKM} = 2,67</math> (66,7% dari indeks 4)</p> <p>Keterangan: IK : indeks kinerja NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi NKM : nilai kinerja atas aspek manfaat <math>W_{NKI}</math> : bobot nilai kinerja atas aspek implementasi <math>W_{NKM}</math> : bobot nilai kinerja atas aspek manfaat</p>	Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

				<p><b>Perhitungan aspek implementasi:</b></p> $NKI = (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E) + (K \times W_K) + (P \times W_P)$ <p><math>W_{CRO} = 43,5\%</math>; <math>W_E = 28,6\%</math>; <math>W_K = 18,2\%</math>; <math>W_P = 9,7\%</math></p> <p>Keterangan: NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi CRO : capaian Rincian Output <math>W_{CRO}</math> : bobot capaian Rincian Output NE : nilai efisiensi unit kerja <math>W_E</math> : bobot nilai efisiensi unit kerja K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan <math>W_K</math> : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan P : penyerapan anggaran <math>W_P</math> : bobot penyerapan anggaran</p> <p>1. Capaian Rincian Output (CRO)</p> $CRO = \left( \sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{n}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian Rincian Output yang diperhitungkan adalah 1-100%</li> </ul> <p>Keterangan: CRO : capaian RO <math>RVRO_i</math> : realisasi volume RO i <math>TVRO_i</math> : target volume RO i n : jumlah RO</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>2. Nilai efisiensi unit kerja (NE)</p> $NE = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ $E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian Realisasi Rincian Output yang diperhitungkan adalah 1-120%</li> <li>• Nilai efisiensi Rincian Output tertinggi 20% dan terendah -20%</li> </ul> <p>Keterangan:  <math>E_{RO}</math> : efisiensi Rincian Output  <math>AARO_i</math> : alokasi anggaran RO i  <math>RARO_i</math> : realisasi anggaran RO i  <math>CRO_i</math> : capaian RO i  <math>n</math> : jumlah RO</p> <p>3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (K)</p> $K = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{RPDK_n -  RPDK_n - RAK_n }{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$ <p>Keterangan:  <math>K</math> : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan  <math>RAK_n</math> : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n  <math>RPDK_n</math> : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n  <math>n</math> : jumlah bulan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>4. Penyerapan anggaran (P)</p> $P = \left(\frac{RA}{AA}\right) \times 100\%$ <p>Keterangan:  <math>P</math> : penyerapan anggaran  <math>RA</math> : realisasi anggaran  <math>AA</math> : alokasi anggaran</p> <p><b>Perhitungan aspek manfaat:</b></p> $NKM = \left( \sum_{i=1}^n \frac{RMK_i}{NMK_i} \times Wimk_i \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:  <math>NKM</math> : nilai kinerja atas aspek manfaat  <math>RMK_i</math> : realisasi indikator manfaat kegiatan  <math>NMK_i</math> : nilai maksimal indikator manfaat kegiatan  <math>Wimk_i</math> : bobot target indikator manfaat kegiatan  <math>n</math> : jumlah indikator manfaat kegiatan</p>	
--	--	--	--	--

**Daftar Variabel Target Rincian Output Indikator Aspek Implementasi**

KODE	URAIAN	TARGET	
		Volume	Satuan
4192.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	212	Laporan
4192.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan
4192.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan

**Daftar Variabel Indikator Aspek Manfaat**

No	Indikator Aspek Manfaat	Bobot	Proyeksi 2023	Keterangan	Sumber Data
1	Nilai keterbukaan informasi publik	20%	88	Berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)	Hasil penilaian Keterbukaan Informasi KIP
2	Indeks SPBE	20%	2,75 (Skala 5)	Berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi SPBE ( <i>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</i> ) oleh Kemenpan RB	Hasil penilaian SPBE Kemenpan RB
3	Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Humas dan TI	15%	3 (skala 4)	Diukur berdasarkan hasil pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan Biro Humas dan TI	Biro Humas TI
4	Nilai SAKIP Biro Humas TI	10%	75	Berdasarkan hasil penilaian mandiri SAKIP	Hasil Tim Penilai Internal
5	Nilai RB Biro Humas TI	10%	82,5	Berdasarkan hasil PMPRB	Hasil Tim Penilai Internal
6	Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Biro Humas TI	5%	B	Diukur berdasarkan jumlah pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang terjadi dalam unit kerja. 0 = A 1 = B 2 - 3 = C 4 - 5 = D >5 = E	Inspektorat

7	Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Biro Humas TI	5%	100%	Berdasarkan persentase jumlah Tindak Lanjut yang dalam kontrol langsung Biro Humas TI atas Rekomendasi yang telah sesuai (status 1) dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (status 4) dibagi jumlah rekomendasi	BPK/Inspektorat
8	Nilai pengelolaan arsip Biro Humas TI	5%	75,26 (Skala 100)	Diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri dan hasil verifikasi dari tim ANRI atas kualitas pengelolaan arsip Biro Humas TI	Tim Pengawasan Kearsipan Internal
9	Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui <i>coaching/mentoring/counseling</i> (CMC)	5%	75%	Diukur berdasarkan jumlah pegawai di unit kerja yang mengalami peningkatan kinerja melalui <i>coaching/mentoring/counseling</i> dibandingkan jumlah seluruh pegawai di unit kerja tersebut	Biro Humas TI
10	Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu	5%	100%	Diukur berdasarkan jumlah aduan dan saran yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja dibandingkan dengan jumlah seluruh temuan aduan dan saran dari Penjaminan Mutu	KU MM

**Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	2023		
		Target	Realisasi	%
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	2,933 (Skala 4)	3,6 (Skala 4)	123%
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/ Tahunan	6	6	100%

**Realisasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2023**



**BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

NOTA DINAS  
NOMOR: 167/PR.06/I/2024

Yth. : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
Dari : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi  
Hal : Penyampaian Data Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2023  
Tanggal : 18 Januari 2024

---

Menindaklanjuti nota dinas Sekretaris Jenderal nomor 42/PR.06/I/2024, tanggal 9 Januari 2024, hal Permintaan Data Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dapat kami sampaikan bahwa kami telah menyelesaikan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan data realisasi dan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2023 Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, sebagai bahan tindak lanjut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat  
dan Teknologi Informasi,



Dodi Wahyugi

---

**PERJANJIAN KINERJA  
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
TAHUN 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi - Aspek Implementasi (33,3%) 1. Capaian Rincian Output 2. Nilai Efisiensi Unit Kerja 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 4. Penyerapan Anggaran - Aspek Manfaat (66,7%)	2,93	3,60	123	
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6	6	100	

Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Aspek Implementasi					
Layanan Hubungan Masyarakat	212	Laporan	343 Laporan	161,79%	Laporan Kegiatan Humas
Layanan Umum	1	Layanan	1 Layanan	100%	
Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1 Layanan	100%	

Indikator	Target	Bobot	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Aspek Manfaat					
Nilai keterbukaan informasi publik	88	25%	94,37	94,37	Komisi Informasi Pusat
Indeks SPBE	2,75	20%	3,75	75	Kemen-Kominfo
Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Humas dan TI	3	20%	3,24	81	
Nilai SAKIP Biro Humas TI	75	10%	73,75	73,75	
Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Biro Humas TI	B	5%	A	100	
Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Biro Humas TI	100%	5%	74,88%	74,88	
Nilai pengelolaan arsip Biro Humas TI	75,26%	5%	86,4%	86,40	
Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui <i>coaching/mentoring/counseling</i> (CMC)	75%	5%	100%	100	
Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu	100%	5%	100%	100	

REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA (PERANJIAN KINERJA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI) TRIWULAN IV TAHUN 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)	Keterangan
Terlaksananya Layanan Kehumasan, Data, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi - Aspek Implementasi (33,3%) 1. Capaian Rincian Output 2. Nilai Efisiensi Unit Kerja 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 4. Penyerapan Anggaran - Aspek Manfaat (66,7%)	2,93	3,6	123	Beberapa program kegiatan masih dalam tahapan (proses) penentuan dan penilaian.  1. Apek Implementasi (33,3%): 99,47 2. Aspek Manfaat (66,7%): 85,23  Total Capaian Indeks Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 = 3,60
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6	6	100%	Draft Laporan Triwulan (I, II, III, IV), Laporan Tahunan, dan Laporan Kinerja Tahun 2023
<b>Indikator Aspek Implementasi</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi Triwulan III</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Aspek Implementasi</b>					
Layanan Hubungan Masyarakat	212	Laporan	343	161,79%	343 Laporan Kegiatan Layanan Humas
Layanan Umum	1	Layanan	1	100,00%	
Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1	100,00%	
<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Bobot</b>	<b>Realisasi Triwulan IV</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Aspek Manfaat</b>					
Nilai keterbukaan informasi publik	88	25	94,37	0	Komisi Informasi Pusat
Indeks SPBE	2,75	20	3,75	0	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Humas dan TI	3	20	3,24	0	
Nilai SAKIP Biro Humas TI	75	10	73,75	0	
Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Biro Humas TI	B	5	A	100%	
Perentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Biro Humas TI	100%	5	74,88%	100%	
Nilai pengelolaan arsip Biro Humas TI	75,26	5	86,4	0	
Rasio pegawai yang mengikuti kinerjanya melalui coaching/mentoring/counseling (CMC)	75%	5	100	0	
Perentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan oduan dan saran Perjanjian Mutu	100%	5	100	100%	



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA

 (021) 2251 3737  
137 (Call Center)

      
OmbudsmanRI137



137